

**PENGARUH PEMEKARAN DESA DI KABUPATEN PESISIR BARAT  
TERHADAP PERCEPATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN**

**(Studi Kasus Pekon Lintik Kecamatan Krui Selatan  
Kabupaten Pesisir Barat)**



**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S.Sos  
Dalam Ilmu Ushuluddin**

**Oleh**

**LESTIAWATI**

**NPM : 1331040089**

**Jurusan : Pemikiran Politik Islam**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1439 H / 2018 M**

**PENGARUH PEMEKARAN DESA DI KABUPATEN PESISIR BARAT  
TERHADAP PERCEPATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN**

**(Studi Kasus Pekon Lintik Kecamatan Krui Selatan  
Kabupaten Pesisir Barat)**

**Pembimbing I : Drs. Effendi, M. Hum**

**Pembimbing II : Drs. Agustamsyah, M. IP**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S.Sos  
Dalam Ilmu Ushuluddin**

**Oleh**

**LESTIAWATI**

**NPM : 1331040089**

**Jurusan : Pemikiran Politik Islam**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1439 H / 2018 M**

## **ABSTRAK**

### **Pengaruh Pemekaran Desa di Kabupaten Pesisir Barat Terhadap Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Studi Kasus Pekon Lintik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat**

**Oleh:**

**LESTIAWATI**

Upaya pemekaran Desa dipandang sebagai cara percepatan dan pemerataan pembangunan daerah. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang pembangunan jembatan yang lambat dan tidak terealisasi cukup lama sedangkan jembatan itu sangat penting yaitu untuk menghubungkan Pekon Lintik sendiri dengan Pekon Padang Haluan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Dimana penulis menggambarkan atau melukiskan obyek yang diteliti melalui teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan lokasi penelitiannya adalah di Pekon Lintik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui pengaruh pemekaran Desa di Kabupaten Pesisir Barat terhadap percepatan dan pemerataan pembangunan studi kasus Pekon Lintik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat dan untuk mengetahui dampak pemekaran Desa di Kabupaten Pesisir Barat terhadap percepatan dan pemerataan pembangunan dilihat dari berbagai aspek pembangunan studi kasus Pekon Lintik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

Hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa pemekaran Desa ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang kurang sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan. Namun demikian adanya pemekaran Desa yang berjalan lebih kurang selama 7 tahun ini membuahkan hasil yaitu percepatan dan pemerataan yang terjadi sangat signifikan karena banyaknya dana yang bersumber dari pemerintah pasca pemekaran Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa percepatan dan pemerataan pembangunan akan terealisasi apabila aparat pemerintah dan masyarakat dapat bekerjasama dengan baik dan saling menerima kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah demi pencapaian tujuan pemekaran Desa. Hasil penelitian ini juga harus ditindak lanjuti dan perlu dilakukan penelitian lanjutan karena diharapkan kedepannya pemekaran Desa selalu membutuhkan aspek-aspek pembangunan guna menjadikan suatu desa yang berhasil dan memiliki daya guna.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Jl. Let Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp. (0721) 703531 Fax. 780422

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi :

**PENGARUH PEMEKARAN DESA DI KABUPATEN  
PESISIR BARAT TERHADAP PERCEPATAN DAN  
PEMERATAAN PEMBANGUNAN (STUDI KASUS  
PEKON LINTIK KECAMATAN KRUI SELATAN  
KABUPATEN PESISIR BARAT)**

Nama Mahasiswa : **LESTIA WATI**  
NPM : **1331040089**  
Jurusan : **Pemikiran Politik Islam**  
Fakultas : **Ushuluddin dan Studi Agama**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas  
Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. Effendi, M. Hum**  
**NIP. 195808211986031004**

**Drs. Agustamsyah, M. IP**  
**NIP. 196801041994031003**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam**

**Dr. H. Nadirsah Hawari, M.A**  
**NIP. 197406282008011013**





**KEMENTRIAN AGAMA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

*Alamat: Jl. Let Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp. (0721) 703531 Fax. 780422*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **PENGARUH PEMEKARAN DESA DI KABUPATEN PESISIR BARAT TERHADAP PERCEPATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN (STUDI KASUS PEKON LINTIK KECAMATAN KRUI SELATAN KABUPATEN PESISIR BARAT)** , Disusun oleh **LESTIAWATI**, NPM: **1331040089**, Jurusan Pemikiran Politik Islam, Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama pada hari / tanggal: Kamis, 21 Desember 2017.

**TIM DEWAN PENGUJI :**

**Ketua : Dr. H. Sudarman, M. Ag.**

(.....)

**Sekretaris : Tin Amalia Fitri, M. Si.**

(.....)

**Penguji I : Dr. H. Arsyad Sobby kesuma, Lc, M. Ag.**

(.....)

**Penguji II : Drs. Effendi, M. Hum.**

(.....)

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama**

**Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc., M. Ag.**

**NIP. 195808231993031001**



## PERNYATAAN KEASLIAN/ ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lestiawati

Npm : 1331040089

Program Study : Pemikiran Politik Islam (PPI)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul , **Pengaruh Pemekaran Desa di Kabupaten Pesisir Barat Terhadap Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan** ( Studi Kasus Pekon Lintik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat), adalah benar karya asli dari peneliti, kecuali sebagian dari sumber yang telah disebutkan.

Apabila dikemudian hari di temukan ketidak benaran dari pernyataan saya ini, maka saya bersedia menerima segala sangsi.



Bandara Lampung, 29 September 2017

Peneliti

**Lestiawati**

**1331040089**

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : “ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hokum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah member pelajaran yang sebaik-baiknya kepada mu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (An-Nisa’ : 56)”



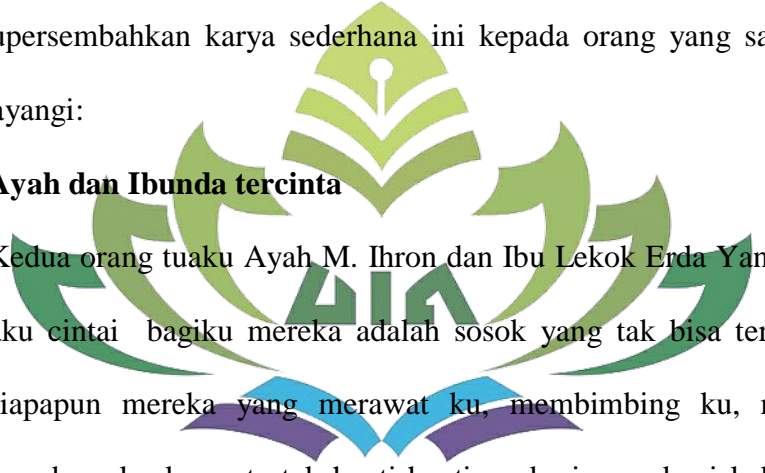
## **PERSEMBAHAN**

### **Yang utama dari segalanya ....**

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya karya sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam terlimpahkan kepada kehariban baginda Rasulullah SAW

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi:

#### **1. Ayah dan Ibunda tercinta**



Kedua orang tuaku Ayah M. Ihron dan Ibu Lekok Erda Yanti yang sangat aku cintai bagiku mereka adalah sosok yang tak bisa tergantikan oleh siapapun mereka yang merawat ku, membimbing ku, mendidik dan membesarkanku serta tak henti-hentinya berjuang demi keberhasilan dan cita-citaku kalian pahlawan tanpa jasaku, penyemangat hidupku, surga hidupku. Trimakasih Ibu....trimakasih Ayah.

#### **2. My Brother's and Sister**

Untuk kedua adikku Lisa Yulia dan Anton tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersama kalian, walaupun sering bertengkar, sering bikin kalian kesal, bikin marah, dan cerewet hal itu akan selalu menjadi warna yang tak dapat tergantikan . Maafkan adikku karena aku belum bisa menjadi kakak yang baik buat kalian dan belum bisa



memberikan apa-apa untuk kalian hanya karya sederhana ini yang bisa aku persembahkan maaf belum menjadi panutan yang baik, tapi aku akan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk kalian berdua.

### **3. My best friend's**

Buat sahabat-sahabat tercintaku “ Susi Ariyanti, Havid Alviani, Yustiana, Aan Suherman, Rizky Arum Dewi, dan Dessy Novita Sari”. Terimakasih selama ini telah menjadi sahabat terbaik aku, trimakasih juga atas bantuan doa, nasehat, hiburan, traktiran, ejekan, dan motivasi yang kalian berikan selama aku kuliah, aku tak akan melupakakan kebaikan kalian semua semoga kita bersaudara dunia maupun akhirat dan sukses dunia akhirat.



## **RIWAYAT HIDUP**

Lestiawati, dilahirkan di Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat Pada Tanggal 15 Juli 1995. Peneliti adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Terlahir dari keluarga yang sederhana yang bahagia mereka adalah sosok yang tak pernah lelah tak pernah mengeluh dan selalu semangat dalam mencari rizki mereka adalah kedua orang tua tercintaku Bapak M. Ihron dan Ibu Lekok Erda yanti.

Pendidikan di mulai dari SD Negeri 1 Sebarus Lampung Barat Tahun 2001. Sekolah Menengah pertama (SMP) Negeri 1 Liwa Lampung Barat Tahun 2007. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Liwa Tahun 2010. Kemudian melanjutkan keperguruan tinggi Negeri di UIN Raden Intan Lampung Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama pada tahun 2013 sampai tahun 2017.

Pengalaman berorganisasi peneliti pernah aktif diorganisasi intra kampus yaitu UKM Pramuka dan Ekstra, Kampus yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama sebagai kader.

Bandar lampung, 06 September 2017

Peneliti

**Lestiawati**

**1331040089**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi berjudul ” **Pengaruh Pemekaran Desa di Kabupaten Pesisir Barat Terhadap Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan** ( Studi Kasus Pekon Lintik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat) ” dengan tepat waktu. Dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi namun berkat bantuan dan motivasi dari Allah SWT, orang tua, dan teman-teman seperjuangan bisa terselesaikan. Tidak lupa pula Shalawat beriring salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muahammad SAW. dan keluarganya beserta para sahabat yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Sebagai penulis tentunya masih banyak kekurangan dalam penulisan proposal skripsi ini, sehingga di perlukan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dalam pembuatan skripsi selanjutnya bisa lebih baik lagi.

Demikian skripsi yang bisa penulis paparkan, penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag selaku Rector Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc.M.Ag selaku dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Dr. Nadirsah Hawari, M.A dan Ibu Tin Amalia Fitri M.Si selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris jurusan Pemikiran Politik Islam

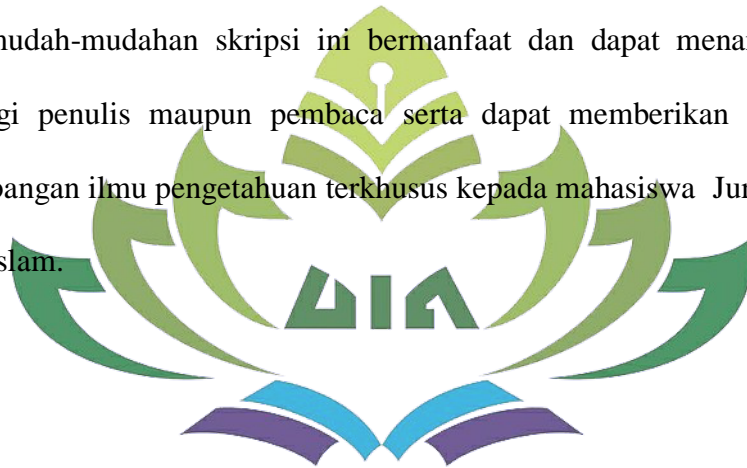
4. Bapak Drs. Effendi, M. Hum selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak saran dan sumbangan pemikiran kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Drs. Agustamsyah, M. IP selaku pembimbing II yang penuh dengan kesabaran dan ketelitian dalam membimbing skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen seluruh Civitas Akademika Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
7. Kepala UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Kepala Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama atas diperkenankannya penyusunan meminjam literatur yang di butuhkan.
8. Bapak Peratin dan seluruh aparat Pekon serta masyarakat beserta jajaran Pekon Lintik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat yang telah memberikan izin dan banyak bantuan selama mengadakan penelitian.
9. Teman-teman seperjuangan Pemikiran Politik Islam kelas B pak kosma Komara Saputa, mantan Kosama Rio Lianzah, Rian Andika, Rian Hidayat, Sulaiman, Samsul Arifin, heri Supriyana, Abdul aziz, Abdullah Pradu, Naslan, hamdi, waizu, Dunya, Dedi, Dian, jaiza, Supratmono Mardiana, Melani, Dian Fentika, Daramona, Ficayani, Eri, Wahyunita, Waniarsih, Sri, Isnaini, Novica, Itun, Nety, Della, Dera, Karnila, Dewi, Astin, Yustiana dan Yanti Susanti. Selama kurang lebih 4 tahun kita bersama semoga pertemanan kita abadi selamanya dan kita semua sukses dunia akhirat senang berteman dan bersaudara dengan kalian semua SUKSES BERJAMAAH dan SALAM SEMANGAT.



10. Teman-teman seperjuangan KKN 66 M. Bahrudin Yusuf, Moch. Ma'ruf Rosadi, Riyan Hidayat, Amelia, Ulfa farida, Agustia Linta Saputri, Mila Rosita, Milta Dwi Pisaba, Dewi Astuti, Tita Sumarni, Suci Amalia dan Septika semoga sukses buat kalian semua.

11. Sahabat dekat Umi Latifah, Indah, Apriyanti, Rosa, Andri Helfina, Uun Lestari, Mia Wijayanti, Aprilia Liyana, Wika semoga Allah SWT selalu melindungi kalian semua.

Semoga jasa-jasa mereka mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan baik bagi penulis maupun pembaca serta dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus kepada mahasiswa Jurusan Pemikiran Politik Islam.



Bandar Lampung, 06 September 2017

Penulis

**Lestiawati**

**1331040089**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	4
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Kegunaan Penelitian .....	11
G. Metode Penelitian .....	11
H. Tinjauan Pustaka .....	18
<b>BAB II PEMEKARAN DESA, PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	
A. Pemekaran Desa .....	21
a. Pengertian Pemekaran Desa .....	23
b. Konsep pemekaran Desa.....	23
c. Kebijakan Dan Strategi pemekaran Desa .....	27
B. percepatan Pembangunan .....	29
a. Pengertian Percepatan Pembangunan.....	29
b. Strategi Dan Aksi Percepatan Pemangunan Daerah ....	29
C. Pemerataan Pembangunan Daerah .....	37
a. Pengertian Pemerataan pembangunan Daerah .....	37
b. Konsep Pemerataan Pembangunan Daerah .....	39



**BAB III            GAMBARAN UMUM PEKON LINTIK KABUPATEN  
PESISIR BARAT**

A. Sejarah Singkat Pekon Lintik Kabupaten Pesisir Barat ...	46
B. Kondisi Geografis dan Demografis.....	49
C. Kondisi Sosial Budaya dan Agama.....	53
D. Kondisi Sosial Politik dan Ekonomi .....	55
E. Gambaran Umum Tentang Pembangunan dari Waktu Kewaktu .....	58

**BAB IV            PENGARUH PEMEKARAN DESA TERHADAP  
PERCEPATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH PASCA PEMEKARAN DESA DI KBABUPATEN  
PESISIR BARAT STUDI KASUS PEKON LINTIK,  
KECAMATAN KRUI SELATAN, KABUPATEN PESISIR  
BARAT**

A. Pengaruh Pemekaran Desa Terhadap Pelayanan Publik di Pekon Lintik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat .....	60
B. Dampak pemekaran Desa terhadap percepatan dan pemerataan pembangunan di lihat dari berbagai Aspek pembangunan .....	65
C. Faktor pendukung dan penghambat percepatan dan pemerataan pembangunan .....	83

**BAB V            PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	93

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

Daftar lampiran I	: Panduan wawancara
Daftar lampiran II	: Dafatra nama informen dan responden
Daftar lampiran III	: Daftar hasil wawancara
Daftar lampiran IV	: Daftar dokumentasi
Daftar lampiran V	: Surat keputusan judul skripsi
Daftar lampiran VI	: Surat izin penelitian kesbangpol propinsi dan kabupaten
Daftar lampiran VII	: Surat konsultasi bimbingan
Daftar lampiran VIII	: Surat telah mengikuti semniar/ sidang munaqosah



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka penulis menganggap perlu di jelaskan maksud dan tujuan dari judul skripsi : **“PENGARUH PEMEKARAN DESA DI KABUPATEN PESISIR BARAT TERHADAP PERCEPATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN (Studi kasus Pekon Lintik Kecamatan Krui selatan Kabupaten Pesisir Barat) ”** untuk menghindari salah pengertian dalam memahami maksud judul skripsi ini, terlebih dahulu akan penulis uraikan beberapa istilah pokok yang terkandung dalam judul tersebut. Hal ini selain dimaksudkan untuk lebih mempermudah pemahaman, juga untuk mengarahkan pada pengertian yang jelas sesuai dengan yang dikehendaki penulis.

Berikut ini dapat dijelaskan beberapa istilah yang terkandung di dalam judul.

Pengaruh adalah dampak kuat yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif dari suatu gejala.<sup>1</sup> Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemekaran Desa di Kabupaten Pesisir Barat Berpengaruh Terhadap Percepatan dan Pemerataan Pembangunan.

Pemekaran Desa secara etimologi berasal dari kata dasar mekar yang artinya mulai berkembang, menjadi terbuka, mengurai.<sup>2</sup> Pemekaran secara bahasa mengandung pengertian proses, cara, perbuatan menjadi bertambah besar

---

<sup>1</sup> Yuke Hardian Siska, *Pertumbuhan dan Perkembangan Remaja*, (Edisi Kesatuan, PKBI, jakarta, 1999), h. 1.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), Edisi kedua, h. 750.



(luas,banyak,lebar).<sup>3</sup> Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Pemekaran Desa adalah pemecahan/ pemisahan diri dari daerah induknya, kemudian membentuk daerah baru baik itu provinsi, kabupaten atau kota dan desa dengan pertimbangan dan alasan-alasan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum menjadi desa tersendiri pembangunan jembatan di Pekon Lintik menunggu hingga 2 tahun lamanya dan setelah terjadinya pemekaran Desa di Kabupaten Pesisir Barat maka akses jalan pun lebih cepat.

Percepatan pembangunan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tingkat pertumbuhan kecepatan.<sup>5</sup> Upaya sadar yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat pembangunan daerah.

Pemerataan pembangunan menurut kamus besar bahasa indonesia adalah proses, pembuatan pemerataan : pembangunan bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan pendapatan bagi warga negara kita.<sup>6</sup>

Pekon Lintik secara administratif termasuk wilayah Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah yang terletak di daerah

---

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 230.

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 540.

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 260.

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 1147.

dataran dengan kondisi pekon aman dan damai. Dengan luas wilayah + 380 Ha.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa penelitian ini adalah penelitian yang berkaitan dengan pengaruh pemekaran Desa di Kabupaten Pesisir Barat terhadap percepatan dan pemerataan pembangunan yang terjadi di Pekon Lintik Kecamatan Krui selatan Kabupaten Pesisir Barat. Pembentukan daerah otonomi, daerah baru yang terpisah dari daerah induk untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Ide awal topik penelitian ini berangkat dari besarnya minat penulis terhadap kajian mengenai Pengaruh Pemekaran Desa di Kabupaten Pesisir Barat Terhadap Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan Studi kasus Pekon Lintik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu alasan penentuan judul ini adalah sebagai berikut:

### **1. Alasan Objektif**

- a. Pemekaran Desa marak terjadi paska ditentukannya undang-undang otonomi daerah banyak persoalan yang timbul, yang meliputi proses dan pelaksanaan pemerintahan baik yang bersifat teknis ataupun non teknis yang sangat menarik untuk di analisis, untuk melihat secara kongkrit apa yang dapat di ambil dari aspek positif dan negatif dari pemekaran wilayah.

- b. Tulisan ini membahas juga tentang pemekaran yang terjadi pada Pekon Sukajadi sehingga berdampak kepada otonomi daerah baru di Pekon Lintik yang sebelumnya adalah bagian dari Pekon Sukajadi dan untuk meningkatkan percepatan dan pemerataan pembangunan di pekon lintik ini yang terlihat jelas pada saat setelah adanya pemekaran Desa yang terjadi di Pekon Lintik tersebut.

## 2. Alasan Subyektif

- a. Pemekaran Desa dalam realitasnya telah memberikan pembangunan yang lebih baik dan akan berdampak terhadap pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah. Hal ini menarik untuk dijadikan bahan penelitian bidang pemikiran Politik Islam. Judul yang diangkat ada kaitannya dengan jurusan Pemikiran Politik Islam.
- b. Literatur yang cukup tersedia dan mendukung penulis sehingga diperkirakan penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

## C. Latar Belakang Masalah

Percepatan dan pemerataan pembangunan yang terjadi banyak harapan yang dimungkinkan dari penerapan otonomi daerah, seiring dengan itu tidak sedikit pula masalah, tantangan, dan kendala yang dihadapi oleh daerah.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Haw. Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2011), h. 6.



Proses pembentukan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3093); dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 or 158); menyatakan bahwa pembentukan daerah didasari pada 3 (tiga) persyaratan, yakni administratif, teknis dan fisik kewilayahan.<sup>8</sup> Persyaratan administratif didasarkan atas aspirasi sebagian besar masyarakat setempat untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan melakukan kajian daerah terhadap rencana pembentukan daerah. Persyaratan secara teknis didasarkan pada faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Adapun faktor lain tersebut meliputi pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan. Persyaratan fisik kewilayahan dalam pembentukan daerah meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan.

Tujuan dilakukannya pemekaran Desa adalah untuk membuka peluang-peluang baru bagi upaya pemberdayaan masyarakat, dan mempercepat pembangunan daerah serta pemerataan pembangunan. Dalam

---

<sup>8</sup> Inu Kencana Syafie, Azhari, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 112.

pembentukan daerah, tidak boleh mengakibatkan daerah induk tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah, dengan demikian baik daerah yang dibentuk maupun daerah induknya harus mampu menyelenggarakan otonomi daerah, sehingga tujuan pemekaran Desa dapat terwujud.

Pemekaran Desa secara intensif berkembang di Indonesia sebagai salah satu jalan untuk percepatan dan pemerataan pembangunan daerah. Setelah berjalan kurang lebih lima tahun, banyak pihak ragu apakah tujuan pemekaran tersebut dapat tercapai atau tidak, meski saat ini pemekaran tidak dapat dilakukan lagi dalam situasi politik yang terjadi namun upaya membangun penilaian yang lebih obyektif akan bermanfaat dalam menentukan arah kebijakan pemekaran selanjutnya.<sup>9</sup>

Upaya pemekaran Desa dipandang sebagai terobosan untuk percepatan dan pemerataan pembangunan daerah. Pemekaran Desa juga bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentan kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan

Perjalanan reformasi di Indonesia telah berlangsung selama kurang lebih 1 dekade lamanya sampai sekarang. Berbagai perubahan telah dilakukan didalam berbagai bidang aspek ketatanegaraan. Perubahan tentang UUD 1945 menjadi peluang yang besar dalam proses menuju negara demokratis yang di cita-citakan. Sebagai dasar hukum atas hukum-hukum yang berlaku di

---

<sup>9</sup> Bappenas dan UNDP, *Studi Evaluasi Dampak pemekaran Wilayah*, 2016.

Indonesia, dengan terjadinya perubahan terhadap UUD 1945 mengakibatkan perubahan terjadi di segala aspek ketatanegaraan.<sup>10</sup> Melalui pemekaran Desa ini diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah..<sup>11</sup>

Perkembangan situasi yang terjadi, perubahan sistem pemerintahan berupa penerapan otonomi daerah yang telah di gulirkan pada tanggal 1 Januari 2001, serta reorganisasi institusi pemerintahan, mengharuskan pemerintah pusat menyelaraskan semua kegiatan pemerintah sesuai dengan perkembangan di lapangan (daerah), dengan memperhatikan kapasitas daerah meliputi kapasitas individu, kelembagaan, dan sistem yang telah dimiliki oleh daerah.<sup>12</sup>

Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan-batasan wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asul-usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/ kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Hari senin tanggal 03 Mei 2010 Pekon Lintik mengalami pemekaran dari pemangku Sukajadi pekon LINTIK yang PJ peratinnya pada saat itu

---

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 1.

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 7.

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 8.



adalah AZWAR. Diresmikan dan dilantik oleh Bupati Lampung Barat nomor 01 tahun 2010 dengan luas wilayah 327 H..

Permasalahan yang terjadi di Pekon Lintik sendiri adalah belum terhubungnya jalan lingkungan pekon dan jalan pinggir pantai menuju pekon padang haluan masih terputus. Yang menjadi keluhan masyarakat pada saat itu adalah Pembangunan jembatan yang lambat dan tidak terealisasi cukup lama sedangkan jembatan itu sangat penting yaitu untuk menghubungkan Pekon Lintik sendiri dengan Pekon Padang Haluan. Selain untuk mempercepat perjalanan menuju Pekon Lintik dan sekitarnya jembatan penghubung itu juga diperlukan untuk menyebrangi sungai yang lebarnya sekitar 1 meter jika tidak hujan dan air laut pasang tetapi jika terjadi hujan dan air laut pasang sungai itu bisa banjir melebihi biasanya dan tidak dapat dilewati kendaraan ataupun pejalan kaki. Pemekaran Desa di Kabupaten Pesisir Barat berpengaruh pada percepatan dan pemerataan pembangunan daerah di Pekon Lintik seperti yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan serta percepatan dan pemerataan pembangunan jembatan di Pekon Lintik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

Pemekaran Desa berdampak pada percepatan dan pemerataan pembangunan di daerah Pekon Lintik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Adanya pemekaran Desa tersebut sangat di perlukan karena untuk meningkatkan pembangunan daerah serta percepatan dan pemerataan di Pekon Lintik sendiri. Apakah percepatan dan pemerataan hanya terjadi setelah pemekaran Desa saja, atau sebelumnya pembangunan jembatan sangat lambat

dan tidak terealisasi cukup lama karena menunggu pemerataan pembangunan di wilayah lain yang sama-sama membangun sebuah jembatan.

Akhirnya, dapat di simpulkan bahwa pemberian otonomi pada pemerintahan daerah haruslah nyata, dinamis, dan bertanggung jawab. Nyata dalam arti desentralisasi pemerintahan karena harus di dasarkan pada faktor-faktor, perhitungan-perhitungan dan tindakan-tindakan atau kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin daerah tersebut mampu mengurus daerahnya sendiri. Bertanggung jawab dalam arti sentralisasi pemerintah karena harus sejalan dengan tujuan yaitu melancarkan pembangunan yang terbesar di pelosok negara yang serasi dan tidak bertentangan dengan pengarahan-pengarahan yang telah di berikan, serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa, menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dampak yang akan timbul dalam masyarakat dan yang menjadi keluhan masyarakat akan jauh lebih penting karena dengan adanya pemekaran Desa diharapkan agar menghasilkan kemajuan pada Kabupaten Pesisir Barat umumnya dan pada Pekon Lintik sendiri khususnya atau malah sebaliknya maka, dari pemahaman-pemahaman yang telah di paparkan tersebut yang dalam hal ini peneliti mengambil judul “ **PENGARUH PEMEKARAN DESA DI KABUPATEN PESISIR BARAT TERHADAP PERCEPATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN (Studi Kasus Pekon Lintik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat)**”.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan penelitian dalam hal ini adalah:

1. Mengapa pemekaran Desa di Kabupaten Pesisir Barat berpengaruh terhadap pelayanan publik studi di pekon Lintik kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat?
2. Apa saja dampak Pemekaran Desa di Kabupaten Pesisir Barat terhadap percepatan dan pemerataan dilihat dari berbagai aspek pembangunan dipekon Lintik Kecamatan Krui selatan Kabupaten Pesisir Barat?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan merupakan hal yang utama yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan. Dengan tujuan, tindakan akan terarahkan secara fokus, begitupun dalam penelitian ini memiliki tujuan tertentu.

Sesuai dengan rumusan masalah, secara umum penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui apakah pemekaran Desa di Kabupaten Pesisir Barat berpengaruh terhadap pelayanan publik studi di pekon Lintik kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.
2. Mengetahui dampak pemekaran Desa di Kabupaten Pesisir Barat terhadap percepatan dan pemerataan pembangunan dilihat dari berbagai aspek pembangunan di Pekon Lintik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.



## **F. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Secara Teoritis
  1. Sebagai bahan informasi ilmiah penelitian-penelitian yang mengkaji otonomi daerah, pemekaran Desa, dan pelayanan publik dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai persoalan pemerintah daerah.
  2. Sebagai tambahan bahan kajian atau literatur dalam Ilmu Politik Islam
- b. Secara Praktis

Sebagai bahan pemikiran dan pertimbangan pemerintah terhadap masyarakat di daerah dalam memekarkan suatu Desa dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dan analisa data, sebelum menguraikan metode tersebut penulis akan menjelaskan terlebih dahulu jenis dan sifat penelitian.

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan atau "*field research*". Penelitian lapangan dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya, penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk

menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat. Penelitian lapangan pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.<sup>13</sup> Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Pemekaran Desa di Kabupaten Pesisir Barat Terhadap Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan.

### **b. Sifat Penelitian**

Dilihat dari sifatnya adalah deskriptif. Yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukis keadaan subyek/obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya.<sup>14</sup> Dalam hal ini penulis akan mengungkapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemekaran Desa serta percepatan dan pemerataan pembangunan di Pekon Lintik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

### **2. Sumber Data**

Proses penelitian kualitatif lebih mementingkan kualitas data dan proses kegiatan objek yang di teliti, oleh karenanya diperlukan data yang benar-benar memahami masalah penelitian. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder

---

<sup>13</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Manjar Maju, 1996), h. 32.

<sup>14</sup> Hadar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gama Press, 1987), h. 63.

### **a. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya.<sup>15</sup> Dalam hal ini penulis menjadikan Kepala Desa Arifin dan Sekretaris Desa Muzanni yaitu sebagai responden dalam mencari data-data yang diperlukan serta dokumen yang diperlukan berupa Profil Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pekon, Laporan Keterangan Penyeleng Pemerintahan Pekon (LKPPP), Dokumentasi kegiatan, dan hal lain yang dibutuhkan.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang sudah jadi atau dipublikasikan untuk umum oleh lembaga yang mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan. Data sekunder disebut juga dengan data tersedia. Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari buku-buku, literature, dan karya-karya yang terkait objek penelitian. Dalam data sekunder peneliti menggunakan buku-buku yang terkait dengan judul penelitian ini yaitu buku Otonomi Daerah dan Daerah Otonom karya prof. Drs. HAW, Widjaja, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan karya Syukani, Sistem politik Indonesia karya Inu Kencana syafei dan Ashari, Ekonomi Pembangunan karya Mudrajad Kuncoro, serta karya-karya, Dokumentasi dan Masyarakat terkait objek penelitian, berdasarkan penelitian ini yang menjadi informan

---

<sup>15</sup>M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 81.

dalam penelitian ini adalah beberapa masyarakat di Pekon Lintik, Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat

Kedua data tersebut dipergunakan dengan saling melengkapi, karena data yang ada dilapangan tidak akan sempurna apabila tidak ditunjang dengan data kepustakaan. Dengan mempergunakan kedua sumber data tersebut maka data yang terhimpun dapat memberikan validitas dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data dari lokasi penelitian, maka penulis menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut :

#### a. Metode Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk mengetahui dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi menurut Kartini Kartono adalah studi yang sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan.<sup>16</sup>

Sedangkan Karl Weick, mendefinisikan observasi sebagai penelitian, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi tertentu, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.<sup>17</sup>

Data yang di peroleh berdasarkan observasi diantaranya mengenai pembangunan jembatan di pekan Lintik Kabupaten Pesisir Barat.

---

<sup>16</sup> Kartini Kartono, *Pngantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar maju, 1996), h. 157

<sup>17</sup> Jalaluddin rahmat, *Metodologi Peneliotian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda karya, 2000), h. 83.



### b. Wawancara (Interview)

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuisisioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden. Dalam hal ini penulis menggunakan interview terpimpin, yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederatan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam interview terstruktur.<sup>18</sup> Teknik ini memberikan peluang yang wajar kepada responden untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan secara bebas dan mendalam. Pada prinsipnya sama dengan metode angket. Perbedaannya pada angket, pertanyaannya diajukan secara tertulis, sedangkan pada wawancara. Pertanyaan diajukan secara lisan.

Adapun jenis wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara tak terpimpin dan terpimpin, jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang.<sup>19</sup> Dalam wawancara, alat pengumpulan datanya disebut pedoman wawancara. Suatu pedoman wawancara, tentu saja harus benar-benar dapat dimengerti oleh pengumpul data, sebab dialah yang akan menanyakan dan menjelaskan kepada

---

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), h. 145-146.

<sup>19</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 85.

responden. Dengan wawancara ini peneliti dapat mengetahui lebih lanjut mengenai informasi yang sesungguhnya tidak tampak jika hanya dilakukan observasi semata, dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai peratin pekon Lintik, sekretaris pekon, tokoh agama dan masyarakat yang dapat dimintai informasi.

### c. Dokumentasi

Sebagai objek yang diperhatikan (ditatap) dalam memperoleh informasi, kita mempersatukan tiga macam sumber, yaitu tulisan (*paper*), tempat (*place*) dan kertas atau orang (*people*). Dalam mengadakan penelitian yang bersumber pada tulisan inilah kita telah menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi dari asal katanya dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti data yang telah dituliskan dalam bentuk buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya.<sup>20</sup>

Metode dokumentasi ini digunakan sebagai data yang tersimpan dalam sebuah arsip dan lengkap serta mudah untuk memberikan keterangan jika sewaktu waktu diperlukan. Metode dokumentasi yang peneliti maksud dalam penelitian ini yaitu dokumen-dokumen yang terdapat di Kantor kelurahan pekon lintik kabupaten pesisir barat yang berkaitan dengan judul penelitian penulis.

---

<sup>20</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 85 .

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis Kualitatif, menurut Suharsimi Arikunto analisis kualitatif digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan dan diangkat sekedar untuk mempermudah dua penggabungan dua variabel, selanjutnya dikualifikasikan kembali.<sup>21</sup> Setelah data tersebut diolah, kemudian dapat dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>22</sup>

Setelah data terkumpul sesuai dengan kebutuhan kemudian data-data tersebut di analisis dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif, yang dimaksud deskriptif kualitatif adalah menguraikan hasil penelitian secara rinci apa adanya.<sup>23</sup>

Teknik analisis yang digunakan deskriptif analisis, dengan mencari gambaran yang sistematis, fakta dan aktual mengenai fakta-fakta dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Pengaruh Pemekaran Wilayah Desa di Kabupaten Pesisir Barat Terhadap Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan studi kasus Pekon Lintik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), Cet, Ke-\$ Edisi Revisi III, h. 209.

<sup>22</sup> Nana Sujana, *karya Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis, Desertasi*, (semarang: Sinar Baru, 1987), h. 6.

<sup>23</sup> Hadi sutisno, *Metode Research I*, (Yogyakarta: YP Fak. Psikologi UGM, 1985), h. 47.

## H. Tinjauan Pustaka

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang penulis temukan, terkait dengan pemekaran wilayah dan otonomi daerah adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang berjudul “ Pemekaran Wilayah Dan Dan Pelayanan Publik Dalam Perspektif Politik Islam, Studi Di Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus” yag ditulis oleh MARDIYANA. D, Pemikiran Politik Islam 2013.<sup>24</sup> Dimana fokus kajiannya pada permasalahan bagaimana dampak pemekaran wilayah terhadap pelayan publik di Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus dan apa tujuan dari Pemekaran Wilayah yang terjadi di Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus.
2. Jurnal yang berjudul “Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Di Kabupaten Lampung Utara “ yang ditulis oleh SUSANTI dalam jurnal ekonomi pembangunan pada tahun 2004.dengan persyaratan yang dimaksud diharapkan agar daerah yang baru dibentuk dapat tumbuh, berkembang dan mampu menyelenggarakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan dalam memperkuat keutuhan negara kesatuan republik indonesia. Tujuan dilakukan pemekaran wilayah pada aderah adalah untuk membuka peluang-peluang baru bagi upaya pemberdayaan masyarakat, dan

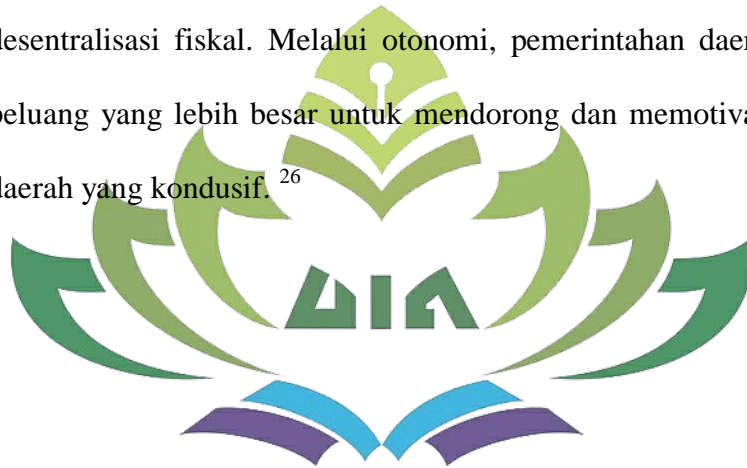
---

<sup>24</sup> MARDIYANA. D ,*Pemekaran Wilayah Dan Dan Pelayanan Publik Dalam Perspektif Politik Islam, Studi Di Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus*” pada tahun 2013



meningkatkan intensitas pembangunan guna mensejahterakan masyarakat, selain itu dengan adanya pemekaran wilayah maka tuntutan akan mutu dari pelayanan yang diberikan pemerintah makin meningkat.<sup>25</sup>

3. Buku yang berjudul “OTONOMI DAERAH DAN DAERAH OTONOM” yang dibuat oleh Prof.Drs.HAW.Widjaja yang diterbitkan oleh, PT Raja Grafindo persada pada tahun 2011 yang terdapat pada BAB 4 tentang “Rencana Kerja Percepatan Otonomi Daerah”. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah penyelesaian persiapan desentralisasi fiskal. Melalui otonomi, pemerintahan daerah mempunyai peluang yang lebih besar untuk mendorong dan memotivasi membangun daerah yang kondusif.<sup>26</sup>




---

<sup>25</sup> Susanti, ”Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Di Kabupaten Lapung Utara”. Jurnal Ekonomi Pembangunan Pada Tahun 2004.  
<http://www.thesis.umy.ac.id/data/publik/downloadt4279.pdf>. di akses pada tanggal 10 maret 2016 pukul 09.00. WIB.

<sup>26</sup> Haw. Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, PT Raja Grafindo Persada Pada Tahun 2011 yang terdapat pada BAB 10 tentang “Kinerja Birokrasi Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah”.

## BAB II

### PEMEKARAN DESA , PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAERAH

#### A. Pemekaran Desa

Otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia bersifat luas, nyata, dan bertanggung jawab<sup>27</sup>. Disebut luas karena kewenangan sisia justru berada pada pemerintah pusat, disebut nyata karena kewenangan yang diselenggarakan itu menyangkut yang diperlukan, tumbuh dan hidup, dan berkembang di daerah, dan disebut bertanggung jawab karena kewenangan yang diserahkan itu harus diselenggarakan demi pencapaian tujuan otonomi daerah, yaitu untuk membuka peluang-peluang baru bagi upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan mempercepat pembangunan daerah serta pemerataan pembangunan.

Otonomi daerah merupakan langkah strategis yang diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, disamping menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah di Indonesia. Pembangunan daerah tidak akan datang dan terjadi dengan begitu saja. Pembangunan di daerah baru akan berjalan jika sejumlah persyaratan terpenuhi yaitu sebagai berikut:

- a. Fasilitasi
- b. Pemerintah daerah harus kreatif

---

<sup>27</sup> A. Ubaedillah dkk (ed), *Pendidikan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi manusia, dan Masyarakat madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2008), Edisi Ketiga, h. 148

- c. Politik lokal yang stabil
- d. Pemerintah harus menjamin kesinambungan berusaha
- e. Pemerintah daerah harus komunikatif dengan LSM/NGO, terutama dalam bidang perburuhan dan lingkungan hidup.<sup>28</sup>

#### **A. Pengertian Pemekaran Desa**

Pemekaran Desa adalah suatu proses pembangian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan pembangunan dalam suatu daerah baru.<sup>29</sup> Pemekaran Desa adalah pembentukan daerah otonom baru untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup>

Pemekaran Desa juga merupakan bagian upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan. Pemekaran Desa adalah pembentukan daerah otonom baru sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan

---

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 155.

<sup>29</sup> Albert Hasibuan, *Otonomi Daerah (Peluang dan Tantangan)*, (Jakarta: Swadaya, 1995), h. 32.

<sup>30</sup> Pemerintah RI, *Undang-Undang Otonomi Daerah*, (jakarta: pemerintah, 2014), h. 4.

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>31</sup>

## **B. Konsep Pemekaran Desa**

Pemekaran Desa menjadi beberapa wilayah baru pada dasarnya merupakan upaya meningkatkan kualitas percepatan dan pemerataan pembangunan daerah, calon daerah baru yang akan dibentuk perlu memiliki basis sumber daya yang harus seimbang antara yang satu dengan yang lain. Hal ini perlu di upayakan agar tidak muncul atau terjadi disparitas yang mencolok pada masa mendatang. Selanjutnya dalam suatu usaha pemekaran Desa akan diciptakan ruang publik baru yang merupakan kebutuhan kolektif semua warga wilayah baru. Ruang publik baru akan mempengaruhi aktivitas orang atau masyarakat, ada yang merasa diuntungkan dan sebaliknya dalam memperoleh pelayanan dari pusat pemerintah baru disebabkan jarak pergerakan berubah.

Pemekaran Desa prinsipnya adalah untuk membuka peluang-peluang baru bagi upaya pemberdayaan masyarakat, mempercepat pembangunan daerah baik dari segi ekonomi, kehidupan demokrasi, pengelolaan potensi daerah, keamanan

---

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 36.

dan ketertiban serta pemerataan pembangunan. Pemekaran Desa adalah upaya untuk meningkatkan sumber daya secara berkelanjutan, meningkatkan keserasian perkembangan antarwilayah dan antar sektor, memperkuat integrasi nasional yang secara keseluruhan dapat meningkatkan kualitas hidup dan perkembangan wilayah.<sup>32</sup>

Konsep Dasar otonomi daerah yang merangkum hal-hal sebagai berikut:

1. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintah dalam hubungan domestik kepada daerah. Kecuali dalam bidang keuangan dan moneter, politik luar negeri, peradilan, pertahanan, keagamaan, serta beberapa bidang kebijakan pemerintah yang bersifat strategis nasional, maka pada dasarnya semua bidang pemerintahan yang lain dapat di desentralisasikan.<sup>33</sup>

Dalam konteks uraian diatas, pemerintah daerah tetap terbagi dalam dua ruang lingkup, bukan tingkatan, yaitu daerah kabupaten dan daerah kota yang diberi status otonomi penuh (otonomi penuh berarti tidak adanya oprasi pemerintah pusat di daerah kabupaten dan kota, kecuali untuk bidang keuangan dan moneter, politik luar negeri,

---

<sup>32</sup> PP No. 129 Tahun 2000

<sup>33</sup> Afiffuddin, *Pengantar Administrasi Pembangunan: Konsep, Teori dan Implikasinya di Era Reformasi*, (Bandung: Alfabeta, 2010), cet. Ke-1, h. 127.



peradilan, pertahanan, keagamaan, serta beberapa bidang kebijakan pemerintah yang bersifat strategis nasional), dan propinsi yang diberi status otonomi terbatas (otonomi terbatas berarti adanya ruang tersedia bagi untuk melakukan operasi di daerah provinsi). Ini alasan mengapa gubernur provinsi selain bersetatus kepala daerah otonom, juga sebagai wakil pemerintah pusat. Karena sistem otonomi tidak bertingkat (tidak ada hubungan hierarki antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota), maka hubungan provinsi dan kabupaten bersifat koordinatif, pembinaan dan pengawasan. Sebagai wakil pemerintah pusat, gubernur mengkoordinasikan tugas-tugas pemerintah antarkabupaten dan kota dalam wilayahnya. Gubernur juga melakukan supervise terhadap pemerintah pusat, serta bertanggung jawab mengawasi penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan otonomi daerah di wilayahnya.

2. Penguatan peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah. Kewenangan DPRD dalam menilai keberhasilan atau kegagalan kepemimpinan kepala daerah harus dipertegas. Pemberdayaan fungsi-fungsi DPRD dalam bidang legislasi, representasi dan penyalur aspirasi masyarakat harus dilakukan.<sup>34</sup> Untuk itu optimalisasi hak-

---

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 128.

hak DPRD perlu di wujudkan, seraya menambah alokasi anggaran untuk biaya operasinya. Hak penyelidikan DPRD perlu dihidupkan, hak prakarsa perlu diaktifkan, dan hak bertanya perlu didorong. Dengan demikian produk legislasi akan ditingkatkan dan pengawasan politik terhadap jalannya pemerintahan bisa diwujudkan.

3. Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur setempat demi menjamin tampilnya kepemimpinan pemerintahan yang berkualifikasi tinggi dengan tingkat akseptabilitas yang tinggi pula.
4. Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah serta pengaturan yang lebih jelas atas sumber-sumber pendapatan negara dan daerah, pembagian pendapatan dari sumber penerimaan yang terkait dengan kekayaan alam, pajak dan retribusi, serta tata cara dan syarat pinjaman dan obligasi daerah.
5. Perwujudan desentralisasi fiskal melalui pembesaran alokasi subsidi dari pemerintah pusat yang bersifat *block grant*, pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah, pemberian keleluasaan kepada daerah untuk menetapkan prioritas pembangunan, serta optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat melalui lembaga-lembaga swadaya pembangunan yang ada.

6. Pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga dan nilai-nilai lokal yang bersifat kondusif terhadap upaya memelihara harmoni sosial sebagai suatu bangsa.<sup>35</sup> Untuk menjamin suksesnya pelaksanaan konsep otonomi daerah tersebut, sekali lagi, diperlukan komitmen yang kuat dan kepemimpinan yang konsisten dari pemerintah pusat. Dari daerah juga diharapkan lahirnya pemimpin-pemimpin pemerintah yang demokratis.

Inti dari konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan hal-hal yang menghambat percepatan dan pemerataan dalam pemekaran wilayah. Dengan demikian tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata, dengan adanya pemekaran Desa maka peningkatan percepatan dan pemerataan pembangunan tidak lagi diabaikan.<sup>36</sup>

### C. Kebijaksanaan Dan Strategi Pemekaran Desa

Percepatan dan pemerataan Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak terlepas dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom daerah yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 129.

<sup>36</sup> HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), cet. Ke-6, h. 2-3.

menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban terhadap masyarakat.

Kebijakan otonomi daerah memiliki implikasi sejumlah kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah, terutama sebelas (11) kewenangan yang wajib sebagaimana dijelaskan dalam perundang-undangan: 1. Pertahanan; 2. Pertanian; 3. Pendidikan dan Kebudayaan; 4. Tenaga kerja; 5. Kesehatan; 6. Lingkungan Hidup; 7. Pekerjaan umum; 8. Perhubungan; 9. Perdagangan dan industri; 10. Penanaman modal; 11. Koperasi. Kesebelasan wewenang tersebut merupakan modal dasar yang sangat penting untuk pembangunan daerah.<sup>37</sup>

Upaya untuk melakukan otonomi daerah merupakan tekad bersama baik aparat yang di pusat maupun yang di daerah. Tentu dalam hal ini harus dilaksanakan dengan hati-hati, seksama namun tidak mengurangi jangka waktu yang telah ditetapkan agar mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Dari uraian di atas, pemekaran Desa diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan kebijakan nasional yang dapat

---

<sup>37</sup> A. Ubaedillah dkk (ed), *Pendidikan Kewarganegaraan (civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan masyarakat madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2008), Edisi ketiga, h. 150.

mencegah kemungkinan terjadinya disintegrasi nasional. Pemekaran Desa dilakukan dalam memperkuat ikatan semangat kebangsaan serta persatuan dan kesatuan diantara segenap warga bangsa.

## **B. Percepatan Pembangunan Daerah**

### **A. Pengertian Percepatan Pembangunan Daerah**

Percepatan Pembangunan Daerah adalah sebuah program uji coba inovatif yang dirintis oleh Pemerintah Indonesia pada bulan Agustus 2005 dan dirancang untuk mengatasi permasalahan pemerintahan dan kebijakan di 51 kabupaten termiskin di seluruh Indonesia. P2DTK didasarkan pada sejumlah proyek pengembangan masyarakat lain yang telah sukses, seperti Program Pengembangan Kecamatan dan untuk menyelaraskan prosedur perencanaan secara bottom-up dengan pemerintah kabupaten yang baru saja diberdayakan.<sup>38</sup>

### **B. Strategi Dan Aksi Percepatan Dan Pembangunan Daerah**

Di dalam pembangunanyang berhasil, ikut sertanya masyarakat luas bukan hanya dalam mengawasi aparat pemerintahan seperti birokrasi pemerintahan . berkenaan dengan ini, apabila kita berbicara mengenai pembangunan , sesungguhnya yang diperbincangkan ialah keterlibatan seluruh masyarakat sebagai sistem terhadap masalah yang dihadapinya dan pencarian jawaban bagi masalah tersebut . lalu kita memperbincangkan

---

<sup>38</sup> Kuncoro, Mudrajad, Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah, dan Kebijakan, (Yogyakarta, Rajawali Pers,2014), h. 47.



pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur dan sarana lainnya, maka kita bukan hanya membicarakan hal-hal yang berkaitan saja tetapi kita amat terikat pada proses pembentukan dalam pelaksanaan pembangunan.<sup>39</sup>

Percepatan pembangunan diarahkan pada pengembangan kegiatan-kegiatan sektor riil dan sektor ekonomi unggulan dengan mengacu pada satuan wilayah pengembangan. Pembangunan berbasis wilayah ini diharapkan tidak saja akan mampu mengurangi kesenjangan di antara wilayah, lebih dari itu pembangunan berbasis klaster ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru yang pada gilirannya dapat mengurangi jumlah pengangguran. Pemerataan pembangunan di tiap klaster akan diupayakan dengan memperhatikan secara cermat karakteristik masing-masing satuan wilayah pengembangan.

Adapun sejumlah aspek penting pendekatan-pendekatan pembangunan yang berlandaskan pada prinsip berikut:

a. Berorientasi pada masyarakat.

Masyarakat di daerah adalah pelaku sekaligus pihak yang mendapatkan manfaat dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sehingga program pembangunan diarahkan untuk kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan praktis dan

---

<sup>39</sup> Soejatmiko, "Problems And Prospects For Development In Indonesia", (Asia. No.5, Oktober 1972), h. 561.

strategis masyarakat yang hasil dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

b. Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat

Proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan sampai kepada pengawasan melibatkan masyarakat. Sehingga aspirasi, kebutuhan daerah dan masyarakat terakomodir dan hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati secara langsung serta dapat memberdayakan masyarakat.

c. Sesuai Dengan Adat Dan Budaya Masyarakat

Dalam membicarakan pembangunan sebagai suatu gejala sosial maka dikalangan disiplin ilmu-ilmu sosial pun terdapat bermacam-macam pandangan. Disamping disiplin ekonomi, maka pembahasan dibagian pembangunan yang menonjol muncul pada disiplin-disiplin sosiologi, politik dan psikologi.<sup>40</sup> Pengembangan kegiatan dilaksanakan dengan memperhatikan adat, budaya dan norma-norma yang terpelihara dan berkembang dalam masyarakat sebagai sebuah kerifan lokal yang memperkaya kasanah budaya bangsa dalam kerangka orientasi lokal, nasional, regional, dan global.

---

<sup>40</sup> *Op. Cit*), h. 84.

d. Berwawasan Lingkungan

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya daerah harus berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Prinsip ini mempertimbangkan dampak kegiatan terhadap kondisi lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di daerah dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

e. Tidak Diskriminatif

Pelaksanaan pembangunan tersebar keseluruh wilayah kecamatan, kampung/kelurahan sesuai pengembangan 6 klaster wilayah kepulauan serta tidak diskriminatif sehingga, tidak akan bias pada kepentingan tertentu.

f. Kemitraan

Pelaksanaan pembangunan berdasarkan prinsip kemitraan antara masyarakat, swasta dan pemerintah

g. Berbasis Pemerintahan Yang Bersih

Penyelenggaraan pemerintahan berbasis pada *clean governments* dan *good governance*.

h. Anggaran Berbasis Kinerja



Pengelolaan anggaran dilaksanakan berdasarkan sistim anggaran berbasis kinerja.<sup>41</sup>

Konsep dan strategi pengelolaan Keuangan Daerah dan percepatan pembangunan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

*Pertama, Kebijakan Privatisasi.*

Kebijakan privatisasi bisa ditempuh dengan tiga pendekatan, yaitu (1) menswastakan penuh suatu bidang tugas pelayanan publik seperti kebersihan, perparkiran pertamanan, *cleaning service*, pengadaan barang , (2) kemitraan pemerintah-swasta, seperti pengolahan air baku menjadi air bersih, bank pasar, PD Pasar dan (3) kontrak manajemen, seperti manajemen terminal angkutan umum, terminal (*emplasement*) kargo atau peti kemas dan sejenisnya di mana asset dan kewenangan ada pada pemerintah tetapi pengelolaannya dikontrakkan kepada swasta yang *bonafide*.

*Menswastakan penuh*, artinya menjual asset dan mengontrakkan kewenangan operasional pengadaan sarana dan prasarana dan pengelolaan kepada swasta yang terpilih melalui tender yang berlangsung jujur dan adil. Pemerintah Daerah mengenakan pajak Daerah dan bagi hasil berdasarkan kontrak yang disepakati bersama baik jumlah maupun jangka waktu. Pada umumnya berjangka waktu cukup panjang terutama jika

---

<sup>41</sup> <http://jipsi.fisip.unikom.ac.id/s/data/jurnal/volume-02/samugyo-ibnu-redjo.pdf/pdf/samugyo-ibnu-redjo.pdf> (di akses pada tanggal 26 juli 2017)

swasta harus menyediakan infrastrukturnya, misalnya untuk perpakiran, persampahan, merenovasi taman, menyediakan lapang tunda kendaraan yang kena derek, dan kendaraan rongsokan atau mogok-tetap. Untuk itu perlu diterapkan Perda yang mengatur hal ikhwal swastanisasi, kemitraan, dan kontrak manajemen.

*Kemitraan antara pemerintah dengan swasta*, bisa diterapkan pada usaha-usaha yang sebelumnya sudah dilakukan melalui semacam BUMD tetapi hasilnya tidak optimal karena usaha tersebut memerlukan kucuran dana segar yang bisa memberatkan keuangan Pemerintah Daerah. Usaha semacam pengolahan air baku menjadi bersih, pengelolaan Bank Pasar, pengelolaan P.D. Pasar bisa ditawarkan kepada swasta untuk bermitra dengan Pemda berdasarkan kontrak bagi-hasil.

Kalau kita menyimak perjalanan pemerintahan di dunia pada abad 21, agaknya sulit disangkal bahwa peristiwa pemerintahan paling spektakuler dalam sejarah, abad ini adalah rontoknya kekaisaran pada tahun 1991, *Life stile* modern semakin luas jangkauan pengaruh nya. Pemerintahan pun dihadapkan pada tekanan-tekanan untuk memungkinkan rakyatnya memperoleh akses pada produk-produk terbaik dengan harga paling murah dari seluruh dunia.<sup>42</sup>

*Kontrak manajemen*, dimana asset dan wewenang sepenuhnya berada pada pemerintah, akan tetapi pengelolaan dikontrakkan kepada swasta

---

<sup>42</sup> Affan Ghaffar, *Otonomi Daerah Dala Negara Kesatuan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), h. 347.



terpilih lewat tender yang *fair* karena jika dikelola oleh pemerintah menjadi tidak efisien, tidak efektif dan juga tidak menguntungkan. Sesuai dengan konsepnya, maka pengelola menerima *management fee* biasanya 40% dari perolehan bersih, sedangkan 60% adalah bagian pemerintah karena ada tanggungjawab untuk merawat dan menjaga assetnya agar tidak terdepresiasi, di samping keharusan untuk memasukkan Pendapatan Asli Daerah. Kontrak manajemen menjadi alternatif yang dianggap paling baik, sebab di masa depan tidak bisa semua asset dan kewenangan pemerintah bisa diwujudkan dalam hasil nyata hanya dengan mengandalkan aparat pemerintah, terutama jika untuk tujuan tersebut ada keharusan aparat memiliki keahlian (profesi) tertentu.

Ketiga macam pendekatan itu bisa dengan cara yang selektif diterapkan pada berbagai bidang tugas Pemerintah Daerah yang terkait dengan pelayanan masyarakat luas sehingga memberikan kepuasan optimal kepada kedua pihak yaitu pihak pemda dan pihak rakyat.<sup>43</sup> Perlu dipahami bahwa berkurangnya keluhan rakyat akan membuat konsentrasi kerja semua aparat Pemda lebih terpusat kepada bidang-bidang tugas yang lebih substansial yang dapat menaikkan citra Daerah, dan akhirnya partisipasi masyarakat akan bergerak dengan sendirinya tanpa harus dikerahkan atau dibuat-buat (*artificial*).

---

<sup>43</sup> <http://jipsi.fisip.unikom.ac.id/s/data/jurnal/volume-02/samugyo-ibnu-redjo.pdf/pdf/samugyo-ibnu-redjo.pdf> (di akses pada tanggal 26 juli 2017)

*Kedua, Pembangunan Infrastruktur Investasi.*

Pembangunan adalah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai sebelumnya yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya dan yang memungkinkan warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri.<sup>44</sup> Dengan bagi hasil yang besar, maka daerah sesungguhnya dapat membangun infrastruktur guna mengembangkan iklim investasi di Daerah tersebut, karena investasi di Daerah sangat bergantung dengan tersedianya infrastruktur yang memadai.

Disamping itu, maka DAK untuk daerah seyogyanya lebih diarahkan kepada pembangunan infrastruktur ini, sehingga dapat membuka keterisolasian antar daerah dan akan mempercepat terjadinya aliran produksi dalam Propinsi. Pembangunan infrastruktur juga akan berdampak kepada ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya di wilayah itu, walaupun kebanyakan investor tersebut sebenarnya lebih mendambakan iklim investasi yang kondusif daripada sekedar pemotongan pajak, buruh murah, atau kesediaan SDA. Dengan kata lain, Stabilitas politik di tingkat Nasional dan Daerah akan menentukan betah tidaknya investor untuk menanamkan modalnya.

---

<sup>44</sup> *Op. Cit*, h. 28.

### *Ketiga, Jaringan Kerja Pemberdayaan*

Keberadaan usaha-usaha produksi di suatu Daerah, teorinya akan membuka peluang bagi berdayanya masyarakat Daerah . Hal itu disebabkan karena pihak investor umumnya akan berharap bahwa usaha produksinya akan terus berjalan, oleh sebab itu, maka pihak investor perlu menjaga lingkungannya yang bukan hanya lingkungan fisik semata, melainkan yang utama adalah lingkungan sosio-ekonomi, yaitu yang berhubungan dengan manusia dan perekonomiannya. Dalam konteks ini, pihak investor umumnya akan menyusun program pembangunan komunitas (*community development*), untuk memberdayakan masyarakat sekitar yang pada gilirannya nanti akan menjadi *benteng* bagi industri. Walaupun demikian banyak usaha-usaha industri yang tidak memiliki program pemberdayaan komunitas lingkungannya, oleh sebab itu Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membuat kebijakan yang mewajibkan pihak investor menyusun Jaringan Kerja Pemberdayaan (*empowering Network*) untuk membangun komunitas lingkungannya sendiri..

## **C. Pemerataan Pembangunan Daerah**

### **A. Pengertian Pemerataan Pembangunan Daerah**

Pemerataan pembangunan Daerah adalah proses, cara, perbuatan pemeratakan: pembangunan bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan ~ pendapatan warga negara.

Pemerataan pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, menjadi isu strategis

sebagai *mainstream* pembangunan ekonomi bangsa Indonesia ke depan. Strategi kebijakan pembangunan yang berpihak kepada pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan akan terus dipacu, guna lebih meningkatkan daya saing menuju kemakmuran yang berkeadilan.

Kemakmuran yang berkeadilan sejatinya merupakan jawaban terhadap berbagai masalah ketimpangan yang masih menjadi tantangan besar bangsa Indonesia ke depan. Ketimpangan yang terjadi antara lain dapat dicermati dari angka kemiskinan, tingkat pengangguran dan pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya konektivitas antar wilayah.<sup>45</sup>

Pemerataan pembangunan merupakan jawaban terhadap masalah ketimpangan, yang salah satu strateginya dapat dilakukan dengan menjamin ketersediaan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan antarwilayah, sehingga mendorong investasi baru, lapangan kerja baru, meningkatnya pendapatan sebagai dampak dari bergeraknya ekonomi lokal.

---

<sup>45</sup> Haeruman. 1996. *Pembangunan Daerah dan Peluang Pemerataan Pembangunan Antar Daerah*, ( Jakarta : Prisma No. Khusus 25 Tahun (1971-1996) h. 216.

## **B. Konsep Pemerataan Pembangunan Daerah**

Sebagaimana diketahui bahwa Pembangunan berkaitan dengan perbaikan kualitas hidup masyarakat, memperluas kemampuan mereka untuk membentuk masa depan mereka sendiri. Secara umum pembangunan menuntut pendapatan per kapita yang lebih tinggi, namun sebenarnya pembangunan mencakup jauh lebih banyak lagi. Pembangunan mencakup pendidikan dan kesempatan kerja yang lebih setara, kesetaraan gender yang lebih besar, kesehatan nutrisi yang lebih baik, lingkungan alam yang lebih bersih dan lesti sistem hukum dan pengadilan yang lebih adil, kebebasan politik, kehidupan kultural yang lebih kaya.

Dengan meningkatkan pendapatan per kapita, sebagian dari aspek itu akan membaik dengan tingkatan yang beragam, namun aspek lainnya tidak. Bagaimana pemerataan pembangunan dapat dipengaruhi sedemikian rupa sehingga dimensi kualitatif dari hasil pembangunan juga dapat lebih baik.

Apabila pertumbuhan mengalami penurunan, maka dimensi sosial dan kesejahteraan juga mengalami penurunan. Ukuran yang sangat berbeda itu, di mana pertumbuhan memberikan kontribusi terhadap perbaikan kesejahteraan, berarti pasti ada suatu keprihatinan langsung terhadap kemajuan yang berkelanjutan dalam kesejahteraan.<sup>46</sup> Ini juga berarti bahwa cara pertumbuhan itu dihasilkan adalah sangat penting. Kualitas

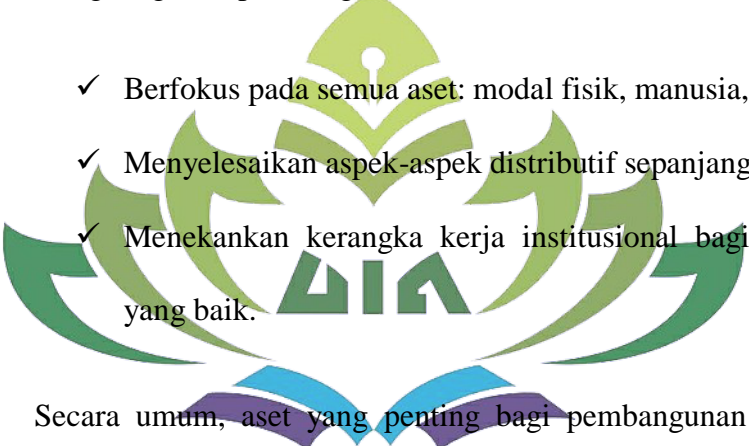
---

<sup>46</sup> <http://rachmatdwimulya.blogspot.co.id/2014/09/konsep-pemerataan-pembangunan-daerah.html> (di akses pada tanggal 26 juli 2017).



proses pertumbuhan itu sendiri, bukan hanya kecepatannya, terbukti mempengaruhi hasil pembangunan persis seperti halnya kualitas makanan rakyat, bukan hanya banyaknya makanan, mempengaruhi kesehatan dan angka harapan hidup mereka. Itulah sebabnya mengapa faktor pemerataan terhadap hasil – hasil pembangunan merupakan hal yang sangat esensial.

Pandangan atas sisi kuantitatif dan kualitatif proses pemerataan pembangunan secara serentak mengarahkan sorotan kepada tiga prinsip kunci bagi kegiatan pembangunan antara lain:

- 
- ✓ Berfokus pada semua aset: modal fisik, manusia, dan alam
  - ✓ Menyelesaikan aspek-aspek distributif sepanjang waktu
  - ✓ Menekankan kerangka kerja institusional bagi pemerintahan yang baik.

Secara umum, aset yang penting bagi pembangunan adalah modal fisik, modal manusia, dan modal alam. Kemajuan teknologis yang mempengaruhi penggunaan aspek-aspek ini juga penting.

Fokus pada pemerataan pembangunan ini menyingkapkan arti penting aspek-aspek distribusional terhadap proses pemerataan dari hasil pembangunan. Suatu distribusi yang lebih setara dalam hal modal manusia, lahan, dan aset produktif lainnya mengimplikasikan suatu distribusi peluang memperoleh pendapatan yang lebih merata, memperbesar kapasitas rakyat untuk memanfaatkan teknologi, dan memperoleh pendapatan.

konsep Pemerataan pembangunan daerah menurut Kartasasmita merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengembangkan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat, melakukan pemerataan fasilitas umum dan sosial serta Pengembangan pembangunan perdesaan dalam upaya peningkatan derajat kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Perkembangan pembangunan daerah tidak terlepas dari perkembangan daerah perkotaan dan perdesaan. Bila diperhatikan proses perkembangan suatu desa menjadi kota, terlihat jelas bahwa kota dan desa, atau kawasan perkotaan dan perdesaan, saling melengkapi dan membentuk satu sistem yang saling terkait. Di satu pihak, keterkaitan antara perdesaan dan perkotaan terlihat dalam pemenuhan bahan pokok pangan, fasilitas dan pelayanan dasar, penyediaan bahan baku, bahan setengah jadi dan sumber daya manusia untuk industri serta kegiatan ekonomi lainnya. Pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut selama ini cenderung berlangsung dari desa ke kota saja. Di pihak lain, daerah perdesaan umumnya memiliki kondisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan daerah perkotaan. Keterbatasan inilah, yakni dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan, lahan usaha, serta sarana dan prasarana pelayanan dasar di perdesaan, yang mendorong terjadinya migrasi ke kota.

Fasilitas komunikasi dasar sebagian pneghuni termiskin global. Dengan membangun semua jaringan yang berbasis teknologi desa proyek

ini bertujuan utama untuk meningkatkan komunikasi baru. Dengan adanya sarana ini, masyarakat desa akan saling mendapatkan keuntungan.<sup>47</sup> Pembangunan perkotaan dan pembangunan perdesaan harus diusahakan sekuat tenaga agar tidak saling merugikan, melainkan justru harus saling mendukung dan saling memperkuat sehingga tercipta pemerataan pembangunan daerah yang dapat dinikmati secara luas oleh masyarakat. Penduduk perdesaan yang cukup besar jumlahnya adalah pasar yang potensial untuk produk yang dihasilkan oleh kawasan per-kotaan. Sebaliknya, perdesaan juga menyediakan input bagi sektor produksi dan konsumsi perkotaan. Daerah perkotaan merupakan sumber barang dan jasa untuk kepentingan produksi di daerah perdesaan. Perkotaan merupakan sumber inovasi dan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat perdesaan. Meningkatnya taraf hidup masyarakat perkotaan di atas pengorbanan masyarakat desa harus dicegah. Berkembangnya kesejahteraan masyarakat perkotaan harus turut mengangkat martabat dan kehidupan masyarakat di perdesaan.

Dalam rangka pemerataan pembangunan daerah maka menurut Kartasmita harus meliputi tiga upaya besar, yang satu sama lain saling berkaitan. Mengembangkan kegiatan dalam keempat alur itu harus merupakan strategi pokok pemerataan pembangunan daerah.<sup>48</sup>

- *Pertama, Memberdayakan Ekonomi Masyarakat*

---

<sup>47</sup> *Op. Cit, h. 234.*

<sup>48</sup> *Op. Cit, h. 235.*

Dalam upaya ini, diperlukan masukan modal dan bimbingan-bimbingan seperti teknologi dan pemasaran untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Upaya tersebut adalah dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat (capacity building) dalam perubahan struktur masyarakat kaearah yang lebih maju dan mandiri. Peningkatan kapasitas masyarakat harus mengikutsertakan masyarakat melalui pemupukan modal (capital accumulation) yang bersumber dari surplus nilai tambah kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan surplus masyarakat yang terakumulasi ini, maka kebutuhan masyarakat baik untuk kepentingan rumah tangga maupun kebutuhan umum (publik) dapat secara bertahap dipenuhi sendiri.

Upaya ini berkaitan erat dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang layak. Untuk itu selain program-program pendanaan di atas, berbagai program sektoral juga teramat penting, di antaranya adalah program sektor unggulan yang dimiliki oleh masing – masing daerah. Sektor unggulan menjadi sangat penting karena masyarakat telah memiliki kegiatan yang telah menjadi kebiasaan sehingga peran pemerintah lebih bersifat fasilitator dan mengarahkan kepada peningkatan nilai ekonomi dari kegiatan unggulan tersebut.

- *Kedua, Pembangunan Prasarana*

Prasarana perhubungan teramat penting kerana sangat menentukan kelancaran arus pemasaran hasil produksi setempat serta barang yang dibutuhkan masyarakat yang tidak dapat dihasilkannya sendiri. Tanpa prasarana perhubungan yang memadai, maka harga komoditas yang diproduksi setempat akan bernilai rendah kerana biaya pengangkutan yang tinggi untuk sampai di pasar. Bahkan keadaan ini juga akan mengakibatkan menurunnya kualitas komoditi pertanian sejalan dengan bertambahnya waktu yang terbuang, sehingga menyebabkan harga makin rendah. Barang hasil industri yang dibutuhkan, pada saat tiba di desa, harganya menjadi lebih tinggi kerana biaya transportasi yang lebih besar. Sebagai akibatnya, nilai tukar yang diterima petani di wilayah perdesaan akan makin memburuk.

Oleh kerana itu, pembangunan jaringan transportasi haruslah diutamakan. Pembangunan jalan, mulai dari jalan arteri, kolektor, sampai ke jalan desa, harus mendapat prioritas untuk dibangun. Demikian pula moda transportasi lain untuk wilayah-wilayah yang amat terpencil dan berkepulauan, seperti angkutan Jaut dan angkutan udara. Agar daerah tidak tertinggal dari kehidupan modern dan bisa mengambil manfaat dari kemajuan umat manusia, arus informasi juga harus lancar. Untuk itu, jaringan

telekomunikasi dan penerangan harus menjangkau di semua wilayah.

- *Ketiga, Pemerataan Fasilitas Umum Dan Sosial*

pemerataan fasilitas umum dan sosial diseluruh wilayah dalam suatu daerah harus menjadi skla prioritas.<sup>49</sup> Hal ini penting agar masyarakat secara menyeluruh dapat menikmati hasil – hasil pembangunan terutama yang berkaitan dengan keberadaan fasilitas umum dan sosial ditengah – tengah kehidupannya.



---

<sup>49</sup> *Op. Cit*, h. 234.



### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM PEKON LINTIK KECAMATAN KRUI SELATAN KABUPATEN PESISIR BARAT**

### **A. Sejarah Singkat Pekon Lintik, Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat**

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan serta pemerataan pembangunan suatu daerah. Daerah pemekaran selain diberikan wewenang untuk mengatur mengurus serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, juga memberikan kesempatan dalam pembentukan daerah otonom sendiri. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang yang membolehkan, yakni dalam NKRI dibagi atas daerah-daerah Provinsi, dan daerah-daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Pembentukan suatu daerah baru, mencakup nama, cangkupan wilayah, batas ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan dan dokumen, serta perangkat daerah.

Pembentukan daerah pemerintahan dapat dilakukan dalam dua tipe atau bentuk, yaitu berupa penggabungan beberapa daerah atau beberapa daerah bersandingan, atau pemekaran satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Berkaitan dengan pembentukan daerah ada dua hal yang mendasar untuk

mendapatkan persetujuan pemekaran suatu daerah.<sup>50</sup> Reformasi saat ini seolah-olah memberikan kemudahan setiap daerah melakukan pemekaran Desa dan tidak ada satupun daerah yang ingin melakukan penggabungan.<sup>51</sup>

Pembentukan suatu daerah pemekaran harus memenuhi prasyarat Administrasi , teknis, dan fisik kewilayahan. prasyarat Administrasi untuk Provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/ Walikota yang akan menjadi wilayah cakupan Provinsi, persetujuan DPRD Provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi dari materi dalam negeri, syarat teknis meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, usul pembentukan daerah tidak di peroses apabila hanya memenuhi sebagian prasyarat saja. Pembentukan dan pemekaran daerah harus bermanfaat bagi pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan daerah pada khususnya dengan tujuan mempercepat pembangunan serta pemerataan pembangunan dalam suatu daerah.

Sejarah dari pemberian nama Lintik berasal dari kata Lentik ,karena Pekon Lintik jika dipandang dari Pekon Tanjung Setia berada ditengah – tengah lautan yang kelihatannya Lentik sekali ,Oleh karena itu dinamakan Pekon Lintik . Masyarakat terdahulu Mengenal nama Pekon ini dengan nama

---

<sup>50</sup> Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2016, *Tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan, Dan Pemekaran Daerah Otonom*, jakarta, hal. 27.

<sup>51</sup> Peraturan Pemerintah No 129 Tahun 2016, *Tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan, Dan Pemekaran Daerah Otonom*, jakarta, 2009.

Padang Negri namun setelah dihuni oleh beberapa tetua zaman dahulu, Sehingga atas kesepakatan bersama maka Pekon ini di beri nama Pekon Lintik.

Kota Liwa sebagai tempat administrasi pelayanan Kabupaten Lampung Barat termasuk kota yang saat ini adalah ibukota kabupaten Pesisir Barat. Kota Krui yang saat ini adalah sebagai tempat administrasi yang baru, lebih dekatnya pusat pemerintahan menjadikan lebih mudahnya masyarakat dalam mendapatkan informasi-informasi mengenai pemerintahan, hal itu dapat dirasakan masyarakat dengan lebih efektif dan efisiennya pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat.

Dengan adanya pemekaran tentu sangat berpengaruh terhadap proses dan kontrol pemerintahan dalam mengevaluasi pembangunan di daerah pemekaran, termasuk didalamnya pengawasan terhadap pembangunan ditingkat Pekon/Desa. Pekon/Desa adalah wilayah pemerintah terkecil akan tetapi mempunyai pengaruh yang signifikan bagi pelaksanaan pemerintahan diatasnya. Dengan baiknya kondisi pemerintahan pekon Kabupaten Pesisir Barat akan lebih mendapatkan perhatian lebih hal tersebut sangat memberikan pengaruh pada pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam konteks kebijakan pembangunan di Indonesia yang dilaksanakan sejak awal pembangunan nampaknya menganut pendekatan yang kompromistis, artinya pendekatan yang mencoba memadukan antara orientasi efisiensi dengan keadilan dan kemandirian daerah. Dengan demikian, maka bobot pembagian

kewenangan yang diantut merupakan campuran sehingga melahirkan asas penyelenggaraan pembangunan yang disebut dekonsentrasi dan desentralisasi.

Pemekaran Desa di Pekon Lintik berpengaruh pada proses dan pelaksanaan pemerintah yang lebih baik atau sebaliknya, mengalami percepatan dan pemerataan yang lebih cepat dari sebelumnya atau malah sebaliknya khususnya dalam pemerintahan pekon sebagai wilayah pusat pemerintahan terkecil. Daerah yang memiliki potensi lebih besar biasanya mampu meningkatkan tarap kehidupan masyarakatnya, sedangkan daerah yang memiliki potensi lebih kecil, tidak jarang malah mengalami kemunduran, kecuali jika daerah tersebut mampu mencari solusi dengan optimalisasi potensi yang ada dan menggali potensi yang masih terpendam.

Pemerintah sebagai lembaga tertinggi dalam pelaksanaan pembangunan dan penentu kebijakan nampaknya mempunyai pengaruh yang besar bagi kemajuan dan perkembangan suatu daerah. Adanya Undang-Undang Otonomi daerah sebagai landasan yuridis yang mengetengahkan hubungan antara pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah menjadi lebih jelas. Otonomi memberikan peluang besar bagi daerah untuk mengembangkan kreativitas agar mampu bersaing dalam hal yang positif tentunya dengan daerah-daerah lain yang ada diseluruh Indonesia. Prioritas ini terlihat dari kemajuan daerah-daerah baru yang memisahkan diri dari daerah induknya, hal ini bertujuan untuk menciptakan kemandirian dan juga kemajuan dalam berbagai aspek masyarakat.

Sebagai pekon yang baru memekarkan diri dari pekon induknya tidak bisa dipungkiri bahwa peran pemerintah sangatlah dibutuhkan, hal ini didasari

pada tatakelola dan sistem pemerintahan yang baru. Pengaruh pemerintah khususnya pemerintah pekan sangatlah mengambil peran. Hal ini terlihat dalam bentuk pembangunan dalam suatu daerah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pekon Lintik secara administratif termasuk wilayah Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah yang terletak di daerah dataran dengan kondisi pekan aman dan damai. Dengan luas wilayah + 380 Ha

Pekon Lintik sendiri dibagi menjadi 5 pemangku yang di pimpin oleh Kepala Pemangku yaitu :

1. Pemangku 1 Dusun Cahaya Negeri I
2. Pemangku 2 Dusun Cahaya Negeri II
3. Pemangku 3 Dusun Cahaya Negeri III
4. Pemangku 4 Dusun Suka Banjar
5. Pemangku 5 Dusun Way Mayah

Sejarah pemerintahan pekan dalam hal ini nama-nama peratin yang pernah memimpin wilayah Pekon Lintik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Nama-nama Peratin Pekon Lintik :


Nama Peratin	Masa Kepemimpinan	Keterangan
Azwar	2010-2015	

Najib Mulyadi	2015-2016	
Arifin	2016-sekarang	

Secara umum sejarah pembangunan pekon yang telah terlaksana di pekon Lintik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat sejak awal terbentuknya Pekon hingga saat ini.<sup>52</sup>

## B. Kondisi Geografis dan Demografis

### a. Batas Wilayah



Batas	Pekon /Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Wai Redak	Pesisir Tengah
Sebelah Barat	Suka Jadi dan Walur	Krui Selatan
Sebelah Selatan	Samudra hindia	Krui Selatan
Sebelah Timur	Padang Haluan	Krui Selatan

### b. Penetapan Batas Pekon dan Peta Wilayah

Penetapan Batas Pekon	Dasar Hukum	Peta Wilayah
Sudah ada/ belum ada	Perdes Nomor .....	Tidak Ada

<sup>52</sup> Buku profil pekon Lintik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir barat 2017, h. 2.



**c. Luas menurut penggunaan**

<i>No</i>	<i>Penggunaan lahan</i>	<i>Luas ( Ha )</i>
1	Tanah sawah	85 Ha
2	Tanah Pemukiman	51 Ha
3	Kebun Rakyat	120 Ha
4	Tanah Pekarangan	127 Ha
5	Kuburan	2 Ha
6	Hutan Neara	-
7	Perkantoran	0,5 Ha
8	Sarana Pendidikan	1,5 Ha
9	Sarana Ibadah	0,5 Ha
10	Lain – lain	0 Ha
	Jumlah	380 Ha

**d. Iklim**

Curah hujan	300	Mm
-------------	-----	----

Jumlah bulan hujan	7	Bulan
Suhu rata-rata	35	<sup>0</sup> C
Ketinggian rata-rata	5	m/dpl

**e. Orbitasi**

Jarak ke Ibukota Kecamatan	2	KM
Waktu tempuh	10	Menit
Kendaraan	Angkutan dan Ojek	
Jarak ke Ibukota Kabupaten	7	KM
Waktu tempuh	0,5	Jam
Kendaraan	Angkutant dan ojek	
Jarak ke Ibukota Provinsi	225	KM
Waktu tempuh	6-7	Jam
Kendaraan	Bis ,travel	

**f. Kependudukan**

Jumlah penduduk laki-laki	619	Jiwa
---------------------------	-----	------

Jumlah penduduk perempuan	576	Jiwa
Jumlah KK	278	KK

**g. Kelembagaan**<sup>53</sup>

1. Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP)	
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pekon (LPMP)	
3. Tim Penggerak PKK	
4. Alkhabariah	
5. Linmas	
6. Karang Taruna	
7. Pekon Lintik Tahun 2016 terdiri dari 5 Pemangku/ dusun, dengan rincian antara lain :	
PMK. Cahaya Negri I	Nama Pemangku : FAHRUL AJIZ
PMK. Cahaya Negri II	Nama Pemangku : PADHILLAH
PMK. Cahaya Negri III	Nama Pemangku : DONA PIKSI YANTI
PMK. Wai Mayah	Nama Pemangku : R I Z W A N
PMK. Suka Banjar	Nama Pemangku : ALEK SANDER <sup>54</sup>

<sup>53</sup> Naskah rencana pembangunan jangka menengah desa tahun 2016-2017 pekon Lintik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, h. 12.

<sup>54</sup> *Ibid*, h. 6.

## C. Kondisi Sosial Budaya Dan Agama

### 1. Sosial Budaya

Perspektif budaya masyarakat di Pekon Lintik masih sangat kental dengan budaya Lampung Sai batin. Hal ini dapat dimengerti karena hampir di semua Pekon di Kabupaten Pesisir Barat masih kuat terpengaruh dengan budaya Lampung Sai batin. Dari latar belakang budaya, kita bisa melihat aspek budaya, dan sosial yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Dalam hubungannya dengan agama yang dianut misalnya, Islam sebagai agama mayoritas yang dianut masyarakat Pekon Lintik, dalam menjalankannya maka masyarakat sangat kental dengan tradisi budaya Lampung Sai batin.

### 2. Sosial Agama

Agama bagi masyarakat khususnya Pekon Lintik diakui warga sebagai identitas daerah, meski kehadirannya dalam kehidupan masyarakat masih relatif, kemudian dari aspek suku, asal dan budaya yang juga berbeda. Tetapi agama yang kita anut hampir seluruhnya adalah islam. Kondisi itu tercermin dari pola, gaya hidup, keyakinan, dan perilaku keagamaan dalam kehidupan kesehariannya. Hampir setiap dusun mayoritas penduduk menganut agama islam. Penganut agama di luar Islam yaitu Kristen dan Hindu, Kristen terdapat di Pemangku Cahaya Negeri I dan Pemangku Cahaya Negeri III. Masyarakat beragaa Islam relatif taat dalam pengamalan ajaran agamanya. Satu indikasi yang dapat dijadikan

parameter adalah adanya sarana ibadah yang cukup memadai bagi mereka menjadi *aib* dan mereka akan sangat marah jika ada yang mengatakan tidak beragama. Meski di Pekon Lintik ini ada tiga agama, namun kegiatan kelembagaan agamanya ternyata cukup beragam (agama Islam). Diantaranya ada pengajian umum yang dilaksanakan jika ada kegiatan yang sifatnya mendadak (secara insidental), pengajian ibu-ibu yang dilaksanakan seminggu satu kali. Selain itu ada juga pengajian remaja dan anak-anak sekaligus TPA serta Grup mawalan. Berbagai kegiatan itu sangat didukung oleh adanya kelembagaan agama yaitu majelis ta'lim dan risma.<sup>55</sup>

#### **D. Kondisi Sosial Politik Dan Ekonomi**

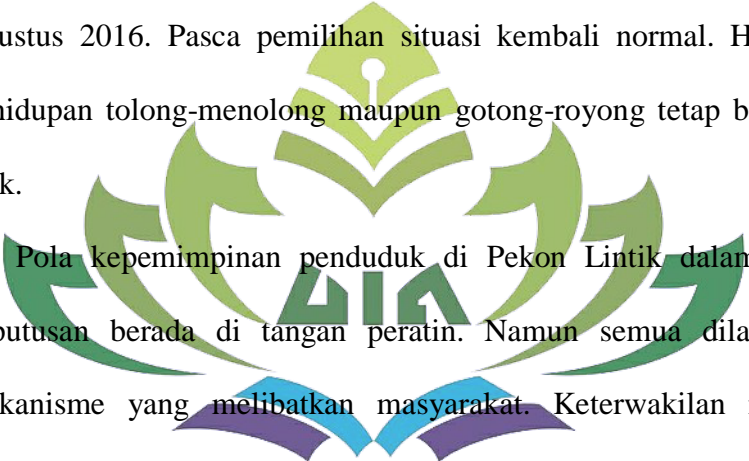
##### **1. Kondisi Sosial Politik**

Seiring dengan perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang di pandang lebih demokratis. Dalam dinamika politik, memang mengalami perkembangan yang sangat signifikan . Jabatan Peratin sejak lama ditentukan dengan cara dipilih secara langsung oleh masyarakat Pekon Lintik . Biasanya para calon peratin yang akan ikut pemilihan peratin adalah orang yang punya kaitan dengan elit lama Pekon tersebut. Misalnya anak peratin terdahulu atau turunan dan keluarganya peratin merupakan suatu jabatan yang tidak serta merta dapat ditawarkan kepada putra seorang peratin.

---

<sup>55</sup> *Ibid*, h. 10.

Peratin dipilih berdasarkan etos kerja, kejujuran serta kedekatan dengan warga sekitar. Seorang peratin bisa diganti sebelum masa jabatannya habis. Jika seorang peratin melakukan hal-hal yang melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Peratin juga bisa digantikan jika berhalangan tetap. Saat ini, siapa saja yang merasa mampu meskipun dari latar belakang apapun asal berani mencalonkan diri, bisa menjadi calon Peratin asal memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan yang berlaku pilihan jabatan peratin yang terakhir dilaksanakan pada bulan Agustus 2016. Pasca pemilihan situasi kembali normal. Hal ini terbukti kehidupan tolong-menolong maupun gotong-royong tetap berjalan dengan baik.



Pola kepemimpinan penduduk di Pekon Lintik dalam pengambilan keputusan berada di tangan peratin. Namun semua dilakukan dengan mekanisme yang melibatkan masyarakat. Keterwakilan masyarakat di tingkat pekon, diwadahi LHP. Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) merupakan lembaga di tingkat pekon yang bertugas mirip dengan legislative. Kebijakan-kebijakan pemerintah pekon harus mendapatkan persetujuan dari LHP. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di Pekon Lintik mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis. Berdasarkan deskripsi dari pola-pola diatas, dapat disimpulkan bahwa Pekon Lintik dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini baik terlihat dari segi kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan



partisipikasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis kedalam politik lokal.

## 2. Kondisi Ekonomi

Dalam menjalankan suatu pembangunan disuatu wilayah membutuhkan sumber pendanaan, baik itu berupa pajak, bantuan program, swadaya ataupun dari sumber lainnya. Demikian halnya dengan Pekon Lintik dimana penerimaan berasal dari berbagai sumber. Adapun sumber penerimaan Pekon Lintik dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4. Tabel sumber penerimaan pekon

No	Sumber Penerimaan Pekon	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	ADP	√	√	√		
2	PPIP			√		
3	PNPM	√	√	√		
4	GMBR		√			
5	APBD PROV					
6	APBD KAB					
7	ADP Dan DD				√	

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Pekon Lintik masih sangat membutuhkan sumber penerimaan Pekon, hal ini berkaitan dengan kebutuhan dana untuk percepatan pembangunan di Pekon tersebut.

a. Potensi Unggulan Pekon.

Kegiatan ekonomi pekon selama ini masih didominasi sektor pertanian, mengingat luas lahan pertanian Pekon Lintik memang cukup luas. Sayangnya, modal dasar yang cukup potensial ini kemudian tidak menjadi berarti karena sumber daya air yang tidak mendukung.<sup>56</sup>

Hal ini disebabkan karena posisi Pekon Lintik adalah sawah tadah hujan. Kondisi seperti ini, secara langsung berpengaruh pada tingkatan penghasilan masyarakat Pekon Lintik. Akibatnya Tingkat pendapatan mereka belum seutuhnya mencukupi kebutuhan hidup, karena harga barang tidak sebanding dengan penghasilan yang di peroleh.

b. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

Sesuai dengan kondisi pekon yang merupakan daerah agraris maka struktur ekonominya lebih dominan kepada sektor pertanian, disamping sektor-sektor lainnya baik berupa perikanan, nelayan, jasa industri, perkebunan, peternakan, pertukangan dan lain-lainnya. Tingkat Pertumbuhan sektor lainnya diluar sektor unggulan/dominan, sangat memungkinkan berkembang apabila adanya pemerhatian yang lebih dari pemerintah dengan membuka jalur pemasaran serta pembinaan dan bantuan permodalan.<sup>57</sup>

## E. Gambaran Umum Tentang Pembangunan Dari Waktu Ke Waktu

Lintik mengalami pemekaran dari pemangku Suka Jadi, Pekon LINTIK yang PJ peratinnya pada saat itu adalah AZWAR. Pembangunan yang terjadi di Pekon Lintik sejak tahun 2010 hingga saat ini, pada tahun 2010 awal pemekaran Pekon Lintik pemerintah merealisasikan pembangunan kantor peratin dan pasar didalam Pekon karena diketahui bersama bahwa masyarakat mengeluhkan pasar

---

<sup>56</sup> *Op. Cit*, h. 6.

<sup>57</sup> *Op. Cit*, h. 8.

yang ada saat itu jauh, mereka harus pergi ke pasar Krui yang di tempuh dengan jarak sekitar 6 KM perjalanan dari Pekon Lintik. Ketika keluhan masyarakat didengar oleh pemerintah maka pemerintah memenuhi permintaan masyarakat sehingga pada tahun 2013 pasar dan kantor peratin sudah dapat di pakai meski kantor peratin yang berlokasi di samping masjid Al-Huda memiliki bangunan yang kecil dan pasar pekan yang berlokasi di samping pertamina sudah bisa di gunakan. Selanjutnya pada tanggal 15 juli tahun 2014 masyarakat kembali mengeluhkan jalan setapak yang menghubungkan Pekon Lintik dan Pekon Padang Haluan karena tingginya air yang pada saat itu telah sampai pada badan jalan dan sering mengalami banjir ketika hujan turun maka pemerintah kembali ikut serta dalam hal ini masyarakat menginginkan dibangunnya jembatan penghubung antara Pekon Lintik dan Pekon Padang Haluan karena untuk memppermudah dan mempercepat perjalan antar kedua nya. Jembatan yang selama ini di harapkan masyarakat akhirnya selesai pada awal tahun 2017 karena banyaknya hambatan dalam pembangunan maka jembatan yang di perkirakan selesai pada pertengahan tahun 2016 itu sudah dapat di uji cobakan pada bulan januari tahun 2017 ini.<sup>58</sup>

Pekon Lintik yang mayoritas bersuku Lampung Sai batin sangat berpegang teguh pada agama dan budaya. Oleh karenanya kegiatan masyarakat setiap harinya memiliki nilai tersendiri seperti pengajian, gotong royong bahkan acara-acara adat yang melibatkan semua suku yang bukan hanya dari suku lampung. Seiringnya waktu setelah pemekaran Desa pekan ini menjadi ramai, pembangunan mulai terlihat sehingga percepatan dan pemerataan yang terjadi sangat signifikan.

---

<sup>58</sup> *Op. Cit*, h. 9.

**BAB IV**  
**PENGARUH PEMEKARAN DESA TERHADAP PERCEPATAN DAN**  
**PEMERATAAN PEMBANGUNAN**  
**DAERAH PASCA PEMEKARAN DESA DI KABUPATEN PESISIR**  
**BARAT STUDI KASUS PEKON LINTIK KECAMATAN KRUI SELATAN**  
**KABUPATEN PESISIR BARAT**

**A. Pengaruh Pemekaran Desa Terhadap Pelayanan publik Di Pekon**  
**Lintik Kabupaten Pesisir Barat**

Kota Liwa sebagai tempat administrasi pelayanan Kabupaten Lampung Barat termasuk kota yang saat ini adalah ibukota kabupaten Pesisir Barat. Kota Krui yang saat ini adalah sebagai tempat administrasi yang baru, lebih dekatnya pusat pemerintahan menjadikan lebih mudahnya masyarakat dalam mendapatkan informasi-informasi mengenai pemerintahan, hal itu dapat dirasakan masyarakat dengan lebih efektif dan efisiennya pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat.

Dengan adanya pemekaran tentu sangat berpengaruh terhadap proses dan kontrol pemerintahan dalam mengevaluasi pembangunan di daerah pemekaran, termasuk didalamnya pengawasan terhadap pembangunan ditingkat Pekon/Desa. Pekon/Desa adalah wilayah pemerintah terkecil akan tetapi mempunyai pengaruh yang signifikan bagi pelaksanaan pemerintahan di atasnya. Dengan baiknya kondisi pemerintahan pekon Kabupaten Pesisir Barat akan lebih mendapatkan perhatian lebih hal tersebut sangat memberikan pengaruh pada pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam konteks kebijakan pembangunan di Indonesia yang dilaksanakan sejak awal pembangunan nampaknya menganut pendekatan yang kompromistis, artinya pendekatan yang mencoba memadukan antara orientasi efisiensi dengan

keadilan dan kemandirian daerah. Dengan demikian, maka bobot pembagian kewenangan yang diantut merupakan campuran sehingga melahirkan asas penyelenggaraan pembangunan yang disebut dekonsentrasi dan desentralisasi.

Pemekaran Desa di Pekon Lintik berpengaruh pada proses dan pelaksanaan pemerintah yang lebih baik atau sebaliknya, mengalami percepatan dan pemerataan yang lebih cepat dari sebelumnya atau malah sebaliknya khususnya dalam pemerintahan pekon sebagai wilayah pusat pemerintahan terkecil. Daerah yang memiliki potensi lebih besar biasanya mampu meningkatkan tarap kehidupan masyarakatnya, sedangkan daerah yang memiliki potensi lebih kecil, tidak jarang malah mengalami kemunduran, kecuali jika daerah tersebut mampu mencari solusi dengan optimalisasi potensi yang ada dan menggali potensi yang masih terpendam.

Pemerintah sebagai lembaga tertinggi dalam pelaksanaan pembangunan dan penentu kebijakan nampaknya mempunyai pengaruh yang besar bagi kemajuan dan perkembangan suatu daerah. Adanya Undang-Undang Otonomi daerah sebagai landasan yuridis yang mengetengahkan hubungan antara pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah menjadi lebih jelas. Otonomi memberikan peluang besar bagi daerah untuk mengembangkan kreativitas agar mampu bersaing dalam hal yang positif tentunya dengan daerah-daerah lain yang ada diseluruh Indonesia. Prioritas ini terlihat dari kemajuan daerah-daerah baru yang memisahkan diri dari daerah induknya, hal ini bertujuan untuk menciptakan kemandirian dan juga kemajuan dalam berbagai aspek masyarakat.

Sebagai pekon yang baru memekarkan diri dari pekon induknya tidak bisa dipungkiri bahwa peran pemerintah sangatlah dibutuhkan, hal ini didasari pada tatakelola dan sistem pemerintahan yang baru. Pengaruh pemerintah khususnya pemerintah pekon sangatlah mengambil peran. Hal ini terlihat dalam bentuk pembangunan dalam suatu daerah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Peneliti mengadakan penelitian dalam rangka menemukan perubahan pembangunan yang terjadi di pekon Lintik khususnya dalam percepatan dan pemerataan pembangunan daerah yang terjadi pasca pemekaran Desa di Pekon Lintik. Banyaknya temuan yang penulis temukan misalnya dalam pelaksanaan pembangunan jembatan yang menghubungkan pekon Lintik sendiri dengan pekon Padang Haluan, pembangunan pasar pekon dan kantor perati pekon Lintik masih banyak kendala yang sama dengan keadaan sebelumnya. Arifin peratin pekon Lintik mengatakan bahwa:

“iya, pemekaran pekon Lintik ini dimekarkan karena alasan ekonomi. Dimana pemekaran Desa diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah serta pemerataan dalam daerah, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dijadikan alasan karena adanya kendala geografis maupun infrastruktur. Dan alasan keadilan, bahwa pemekaran Desa dijadikan untuk mendapatkan keadilan. Artinya, pemekaran Desa diharapkan akan menciptakan keadilan terutama dalam pembangunan. Lebih kurang seperti itu”.<sup>59</sup>

Hasil wawancara yang di simpulkan oleh peneliti adalah alasan mengapa harus adanya pemekaran di Pekon ini dan motivasi yang melatarbelakangi adanya pemekaran itu terlaksana karena berbagai alasan di atas.

---

<sup>59</sup> Arifin, peratin pekon Lintik, kecamatan Krui Selatan kabupaten Pesisir Barat (wawancara pribadi tanggal 23 mei 2017)



Alasan lain juga di nyatakan oleh bapak sekretaris pekon. Muzanni sekretaris pekon menyatakan bahwa:

“iya, sebenarnya terbentuknya pekon Lintik juga sangat dipengaruhi oleh lambatnya pembangunan serta kurangnya perhatian pembangunan dari pemerintah baik dari kecamatan maupun pekon induknya, dan menyebabkan masyarakat merasa kurang diperhatikan terutama dalam hal pembangunan yang jelas bahwa terwujudnya pembangunan akan berimbas kepada lancarnya masyarakat dalam beraktivitas, selain itu faktor luas wilayah juga sangat mendukung untuk dibentuknya pekon Lintik, Kec. Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.”<sup>60</sup>

Dari beberapa pendapat masyarakat Pekon Lintik dan dilihat dari berbagai aspek pembangunan yang di amati, masyarakat menyatakan bahwa pemekaran Desa telah mampu memberikan perubahan terhadap pembangunan baik fisik maupun non fisik di pekon Lintik namun lambatnya pemerintah dalam menangani pembangunan karena disebabkan oleh faktor ekonomi pekon yang masih minim/kurang.

Terbukti saat ini bahwa pekon Lintik bukanlah pekon yang kecil, sempit, masyarakat nya sedikit tetapi pekon Lintik sekarang menjadi pekon yang ramai, baik masyarakat asli maupun pendatang, pekon yang mampu memberikan pembangunan yang baik kepada masyarakat, pekon yang memiliki keindahan pantai yang indah, dan bukan pekon yang terbelakang pasca pemekaran Desa yang terjadi kurang lebih 7 tahun silam.

Pengaruh pemekaran wilayah Pekon Lintik dalam percepatan dan pemerataan pembangunan dan dpengaruhi oleh faktor ekonomi yang kurang

---

<sup>60</sup> Muzanni, Sekretaris Pekon Lintik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat,(wawancara pada tanggal 23 mei 2017).

sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan. Namun demikian adanya pemekaran Desa yang berjalan lebih kurang selama 7 tahun ini membuahkan hasil yaitu percepatan dan pemerataan yang terjadi sangat signifikan. Maka dari itu terlihat bahwa apa yang diharapkan oleh masyarakat kini sudah terwujud sehingga masyarakat mampu beraktivitas dengan baik.

### **B. Dampak Pemekaran Desa Terhadap Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan Di Lihat Dari berbagai Aspek Pembangunan**

Dengan mempertimbangkan perkembangan regional terutama di Kabupaten, Kota dan desa, maka suatu kebijakan pemerintah untuk percepatan dan pemerataan pembangunan daerah sebagai suatu langkah strategis yang sudah sangat mendesak.

Adapun tujuan percepatan dan pemerataan pembangunan daerah adalah untuk:

1. Memberikan dan menjamin pemenuhan hak dan kesempatan kepada setiap masyarakat dan untuk mewujudkan keadilan agar setara dengan daerah lainnya.
2. Memberdayakan masyarakat melalui pembukaan atau peningkatan akses dalam berbagai bidang sehingga mereka mampu menjaga harkat dan martabat sebagaimana masyarakat lainnya.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pada kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan.

4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana.
5. Mempercepat terciptanya keseimbangan pembangunan daerah pasca pemekaran dengan daerah lainnya, sehingga terjadi harmonisasi kehidupan antarmasyarakat.<sup>61</sup>

Dengan adanya pemekaran wilayah ternyata membawa dampak bagi masyarakat dan pemerintah. Salah satu dampak yang terjadi tersebut adalah di bidang pembangunan seperti, pembangunan jembatan, kantor pemerintahan, pasar dll. Pembangunan secara global disebutkan sebagai suatu proses yang terencana dalam upaya pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial guna peningkatan kualitas hidup manusia.

Dengan adanya pemekaran Desa di pekon Lintik ini diharapkan akan membantu percepatan dan pemerataan pembangunan secara menyeluruh. Sesuai dengan tujuan dan maksud pemekaran ini antara lain:

1. Peningkatan penyelenggaraan pemerintah yaitu seluruh aktivitas aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat guna untuk upaya percepatan dan pemerataan pembangunan di pekon Lintik melalui pendekatan birokrasi pemerintahan kepada masyarakat.
2. Peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan. Terlibatnya masyarakat dalam pembangunan adalah kegiatan yang

---

<sup>61</sup> Djojohadikusumo, Sumitro., *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta, Rajawali Pers, 1994), h. 159.

membangun seperti, pembangunan sarana jalan, sarana ibadah, sosial, budaya dan perekonomian pekon.

Pemekaran secara umum akan memberikan dampak yang baik untuk perkembangan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan. Percepatan dan pemerataan di pekon Lintik mulai dirasakan oleh masyarakat pasca pemekaran Desa. Nur Arifin Masyarakat Asli pekon Lintik mengatakan:

“Alhamdulillah dampaknya ya saya dan keluarga senang, karena sekarang pembagian beras raskin sudah tepat waktu gak kayak dulu yang harus nunggu giliran karena per 20 kepala keluarga jadi gak setiap bulan dapatnya. Kebetulan saya gak punya sawah mbak jadi beras beli terus kalau ada beras raskin kan bisa mengurangi beban saya sedikit gitu, dan yang lebih saya syukuri adalah pembangunan jembatan penghubung pekon Lintik dan pekon Padang Haluan itu sangat membantu saya karena kebetulan saya berjualan di pantai WALUR jadi jembatan itu sangat membantu mempercepat perjalanan saya. ya intinya pemekaran itu berdampak positif buat saya dan keluarga semua alhamdulillah.”<sup>62</sup>

Hasil wawancara peneliti dengan bapak Nur Arifin sebagai masyarakat yang di wawancara pada tanggal 15 juli 2017 tentang dampak pemekaran desa terhadap percepatan dan pemerataan pembangunan di pekon Lintik. Tentu menurutnya pemekaran Desa memberikan dampak positif dan mempermudah segala urusannya. Peneliti mengambil kesimpulan sesuai dengan hasil wawancara dan observasi tentang dampak pemekaran Desa terhadap percepatan dan pemerataan pembangunan sebagai berikut:

---

<sup>62</sup> Nur Arifin, Masyarakat asli pekon Lintik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat (wawancara pribadi pada tanggal 15 juli 2016)

## 1. Pelayanan Administrasi

Pelayanan administrasi oleh aparaturnya pemerintahan di Pekon Lintik terhadap masyarakat terjadi perubahan yang sangat mendasar, hal ini diakibatkan tersediannya aparaturnya pegawai pekon yang melayani masyarakat dengan jumlah yang lebih kecil, serta semakin terfokusnya pelayanan administrasi pada wilayah pekon Lintik.

Dalam BAB II Konsep Dasar otonomi daerah yang merangkum Perwujudan desentralisasi fiskal melalui pembesaran alokasi subsidi dari pemerintah pusat yang bersifat *block grant*, pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah, pemberian keleluasaan kepada daerah untuk menetapkan prioritas pembangunan, serta optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat melalui lembaga-lembaga swadaya pembangunan yang ada.

Jika dilihat lebih jauh penerapan kebijakan pemekaran Desa yang terjadi dipekon Lintik pasca pemekaran sekarang ini, cukup memberikan dampak positif. Melalui pemekaran Desa yang menyebabkan adanya sistem desentralisasi. Pemerintah daerah diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur daerahnya, karena dinilai pemerintahan daerah lebih mengetahui kondisi daerahnya masing-masing. Disamping itu dengan diterapkannya sistem desentralisasi diharapkan biaya birokrasi yang lebih efisien. Hal ini merupakan beberapa pertimbangan mengapa pemekaran Desa harus dilakukan.

## 2. Infrastruktur

Dalam sudut pandang ekonomi kontribusi infrastruktur dalam pembangunan adalah untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan yang meliputi kesenjangan, pengangguran, dan kemiskinan sebagai berikut. Infrastruktur sebagai sarana pra sarana yang mempermudah aksesibilitas dari satu tempat ke tempat lain, akan memberikan kemudahan dalam distribusi pembangunan fasilitas-fasilitas lainnya. Sehingga, percepatan dan pemerataan pembangunan dalam hal apapun menjadi lebih mudah. Hal ini mempermudah penyelesaian masalah pengangguran dan kemiskinan. Ketika akses mudah, insentif untuk membangun usaha meningkat karena kemungkinan untuk sukses lebih besar. Adanya usaha-usaha baru menciptakan lapangan pekerjaan sehingga pengangguran berkurang. Terakhir, ketika kesenjangan dan pengangguran teratasi, maka kemiskinan dapat berangsur menurun.

Singkatnya, infrastruktur sangat berpengaruh dan berperan penting dalam percepatan dan pemerataan suatu daerah. Pembangunan Sarana Jalan Dalam rangka memperlancar penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan dan kegiatan masyarakat perlu didukung dengan pembangunan infrastruktur yang memadai. Salah satunya pembangunan bidang sarana dan prasarana jalan. Karena dengan sarana jalan yang memadai, niscaya penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan dan kepentingan masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif. Disisi lain dapat memudahkan aksesibilitas penduduk dalam segala bentuk kegiatan yang menyangkut kehidupan masyarakat. Jalan merupakan prasarana yang sangat vital untuk menunjang kelancaran sarana transportasi sekaligus



sebagai penggerak perekonomian masyarakat serta sebagai jalur arteri bagi transportasi lokal, karena itu sudah selayaknya pembangunan sarana jalan dan jembatan mendapat perhatian yang lebih besar, sehingga harapan masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses dapat diwujudkan. Sesuai dengan fungsinya, kondisi jalan sangat mempengaruhi kelancaran hubungan antar kampung, maupun antar wilayah kecamatan. Muzanni sekretaris pekon Lintik mengatakan:

“iya, pembangunan infrastruktur jalan lintas masuk kompleks rumah warga dalam pekon dan jembatan penghubung pekon Lintik dan pekon Padang Haluan yang juga semakin mengalami percepatan pembangunan yang pesat di pekon Lintik. Pembangunan jalan dan jembatan yang banyak melibatkan masyarakat dalam pembangunannya terutama bagi masyarakat yang bekerja sebagai tukang dan buruh bangunan, sehingga secara langsung pembangunan infrastruktur itu memberikan dampak positif yaitu berupa penyerapan tenaga kerja dan hasilnya akan dirasakan oleh masyarakat luas. Saya sebagai sekretaris pekon berterimakasih atas kesabaran dan doa masyarakat untuk semua kendala-kendala yang terjadi sebelum pemekaran dan saat ini dapat dirasakan oleh masyarakat atas percepatan pembangunan yang terjadi termasuk pembangunan pasar dan kantor peratin”.<sup>63</sup>

Hasil wawancara pada tanggal 23 mei 2017 kepada sekretaris pekon yaitu bapak muzanni bahwa pemekaran Desa di Pekon Lintik terhadap percepatan dan pemerataan pembangunan berdampak positif bagi masyarakat yang bekerja sebagai buruh dan kuli bangunan di daerah itu karena dengan adanya pembangunan jembatan dan pembangunan-pembangunan lainnya pasca pemekaran Desa tentu memberikan keuntungan bagi masyarakat untuk menambah

---

<sup>63</sup> Muzanni, sekretaris pekon Lintik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat (wawancara pribadi pada tanggal 23 mei 2017)

penghasilan mereka sehari-hari. Nur arifin masyarakat asli pekon Lintik mengatakan:

“ya, berkaitan dengan dampak yang terjadi pasca pemekaran jujur saya sebagai masyarakat benar merasakan banyak kemudahan baik dari pembangunan jalan, dan pembangunan lainnya” ya alhamdulillah mbak”<sup>64</sup>

Menurut salah satu masyarakat yang peneliti wawancara yaitu bapak Nur Arifin iya hanya berkomentar singkat mengenai dampak pemekaran wilayah pekon Lintik terhadap percepatan dan pemerataan pembangunan beliau bersyukur dengan adanya pemekaran Desa dapt mempermudah dan memperlancar urusannya dan sangat dirasakan oleh beliau dan keluarga.

Pembangunan yang dilaksanakan setelah terjadinya pemekaran Desa sangat membantu masyarakat, dibidang sarana jalan lalu lintas, pembangunan infrastruktur pembangunan kantor peratin, pembangunan pasar, pembangunan sarana jalan kompleks rumah warga, dan pembangunan jembatan penghubung pekon Lintik dan pekon Padang Haluan. Muzanni sekretaris pekon Lintik mengatakan:

“saya sebagai sekretaris pekon yang sudah lama tinggal dan menetap di pekon ini sangat puas dengan semua pembangunan yang akhir-akhir ini dilakukan dipekon Lintik, apalagi pasca pemekaran Desa terjadi bukan hanya dalam pembangunan infrastruktur saja tetapi tersedianya lapangan pekerjaan yang tersedia juga berpengaruh. Karena yang saya syukuri adalah banyaknya anak-anak yang lulus sekolah dan tidak kuliah sudah dapat bekerja di pekon mereka sendiri tanpa jauh dari orang tua. Intinya saya bersyukur sekali dengan adanya pemekaran Desa ini”<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Nur Arifin, Masyarakat pekon Lintik kecamatan Krui selatan Kabupaten Pesisir Barat (wawancara pribadi pada tanggal 15 juli 2017)

<sup>65</sup> Ibid, Sekretaris pekon bapak Muzanni (wawancara pribadi pada tanggal 23 mei 2017)

Hasil wawancara peneliti kepada sekretaris pekon yaitu bapak Muzanni pembangunan infratraktur juga memberikan dampak baik terhadap generasi muda yang memiliki cita-cita tinggi sehingga setelah lulus sekolah mampu meiliki penghasilan sendiri dan tidak menjadi pengangguran. Karena memang sebagian dari anak-anak yang lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) tidak melanjutkan ke perguruan tinggi karena keadaan orang tua yang hidup hanya cukup untuk sehari-hari.

Disamping itu, DAK untuk daerah seyogyanya lebih diarahkan kepada pembangunan infrastruktur ini, sehingga dapat membuka keterisolasian antar daerah dan akan mempercepat terjadinya aliran produksi dalam Provinsi. Pembangunan infrastruktur juga akan berdampak kepada ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya di daerah itu, walaupun kebanyakan investor tersebut sebenarnya lebih mendambakan iklim investasi yang kondusif daripada sekedar pemotongan pajak, buruh murah, atau kesediaan SDA. Dengan kata lain, Stabilitas politik di tingkat Nasional dan Daerah akan menentukan betah tidaknya investor untuk menanamkan modalnya.

Pembangunan berbasis Desa ini diharapkan tidak saja akan mampu mengurangi kesenjangan di antara Desa, lebih dari itu pembangunan berbasis klaster ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru yang pada gilirannya dapat mengurangi jumlah pengangguran. Pemerataan pembangunan di tiap klaster akan diupayakan dengan memperhatikan secara cermat karakteristik masing-masing satuan wilayah pengembangan.

Otonomi daerah sebagai komitmen dan kebijakan politik nasional merupakan langkah strategis yang diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan daerah, disamping menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah di Indonesia. Kebijakan pembangunan yang sentralistis pada masa lalu dampaknya sudah diketahui, yaitu adanya ketimpangan antar daerah. Namun demikian pembangunan daerah tidak akan terjadi dengan begitu saja. Tanpa proses-proses pelaksanaan pemerintahan yang akuntebel yang dilakukan oleh para penyelenggara pemerintahan di daerah, yaitu pihak Legislatif dan Eksekutif di daerah.

### 3. Ekonomi

Perwujudan desentralisasi melalui pembesaran alokasi subsidi banyak sekali keuntungan dimana pemerintah daerah akan mudah untuk mengelola sumber daya alam yang dimilikinya, dengan demikian apabila sumber daya alam yang dimiliki telah dikelola secara maksimal maka pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat. Pelaksanaan desentralisasi mempunyai dua efek yang sangat berlawanan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan tergantung dari pendekatan dan penerapannya. Arifin peratin pekon Lintik mengatakan:

“Pekon Lintik memiliki banyak sekali lapangan pekerjaan yaitu selain masyarakat yang memang bekerja sebagai pejabat pemerintahan juga hasil pekon yang dapat di kelola adalah hasil perkebunan, nelayan, petani dan pariwisata. Hasil perkebunan yaitu damar dan cengkeh tetapi kendala besar masyarakat adalah kebun yang jauh dari rumah menyebabkan masyarakat lebih banyak tidak mengurus kebun dan memiliki pekerjaan lain. Nelayan, masyarakat pekon Lintik juga menggeluti pekejaan sebagai nelayan meski hasil tidak terlalu banyak

tetapi menguntungkan bagi masyarakat setempat. Sebagian besar masyarakat adalah berprofesi sebagai petani padi, karena pekan Lintik termasuk pekan yang terletak di perbatasan persawahan yang lebar. Di bagian pariwisata pantai dipekan lintik memiliki keindahan yang luar biasa tetapi untuk saat ini area pantai sedang di tutup karena ombak yang tinggi menjadi kendala. Saya mendukung penuh untuk penutupan itu karena membahayakan pengunjung apalagi kebanyakan kan bujang gadis. Ya takutnya ada hal negatif yang terjadi”.<sup>66</sup>

Hasil wawancara peneliti kepada peratin pekan Lintik yaitu bapak Arifin peneliti menyimpulkan bahwa memang kondisi ekonomi pekan Lintik tidak diragukan lagi pekan akan bernilai tinggi apabila semua bidang yang ada di gali dan terus didukung oleh pemerintahan. Namun demikian pembangunan daerah tidak akan terjadi dengan begitu saja. Tanpa proses-proses pelaksanaan pemerintahan yang akuntabel yang dilakukan oleh para penyelenggara pemerintahan di daerah, yaitu pihak Legislatif dan Eksekutif di daerah. Kebijakan otonomi daerah memiliki implikasi sejumlah kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah, terutama sebelas (11) kewenangan yang wajib sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang: 1. Pertahanan; 2. Pertanian; 3. Pendidikan dan Kebudayaan; 4. Tenaga kerja; 5. Kesehatan; 6. Lingkungan Hidup; 7. Pekerjaan umum; 8. Perhubungan; 9. Perdagangan dan industri; 10. Penanaman modal; 11. Koperasi. Kesebelasan wewenang tersebut merupakan modal dasar yang sangat penting untuk pembangunan daerah.<sup>67</sup>

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara

<sup>66</sup> Op.Cit, Arifin peratin (wawancara pribadi pada tanggal 23 mei 2017)

<sup>67</sup> A. Ubaedillah dkk (ed), *Pendidikan Kewarganegaraan (civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan masyarakat madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2008), Edisi ketiga, h. 150.

propesional dan berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah.

#### 4. Sosial budaya

Perkembangan sosial budaya juga semakin meningkat dan mengalami kemajuan dari sebelumnya dengan diadakannya pesta-pesta adat yang memang lahir sebelum adanya pemekaran Desa namun perbedaannya adalah banyaknya masyarakat yang bukan asli pekon Lintik ikut serta dalam pesta adat yang terlaksana sekarang ini. Kerja adat dan pengaturan kehidupan sehari-hari di perbaiki sehingga konflik antar suku masyarakat di pekon Lintik tertata dengan baik sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan leluhurnya, sehingga setiap perselisihan paham di upayakan akan dimusyawarahkan para petua lembaga adat, dan jika tidak terpecahkan selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwajib. Thoibi adalah nama tokoh adat dan agama / petua pekon mengatakan:

“Iya, adat budaya yang ada di pekon Lintik ini sangat kental sejak zaman nenek moyang bapak dulu. Di pekon ini mayoritas adalah Lampung asli Sai Batin. Ada beberapa suku pendatang pun di pekon ini dan walaupun mereka pendatang tetapi mereka bisa menyesuaikan dengan adat disini. Alhamdulillah untuk pekon lintik semua kegiatan sudah berjalan dengan baik seperti gotong royong, pengajian, acara lampung orkes lampung dan bedikegh. Kegiatan gotong royong pada umumnya dilakukan dengan dikepalai oleh bapak peratin pekon atau sekretaris pekon Lintik dan bekerjasama dengan lembaga adat karena kegiatan gotong royong akan lebih terarah dan mudah terlaksana. Untuk kegiatan lain seperti pengajian itu dilaksanakan pada malam jum’at untuk bapak-bapak dan malam selasa untuk ibi-ibu. Sedangkan untuk acara adat sendiri acara orkes lampung dan bedikegh dilakukannya latihan setiap malam minggu yang diikutsertakan adalah bujang dan gadis atau di pekon Lintik sendiri disebut muli Meghanai. Acara orkes lampung dan bedikegh itu dipakai pada saat ada acara



nikahan, sunatan atau acara yang memang menggunakan arak-arakan dan di iringi oleh bedikegh.”<sup>68</sup>

Hasil wawancara kepada tokoh Adat yaitu bapak Thoibi bahwa antusias yang luar biasa yang diberikan oleh bapak peratin pekon Lintik yaitu bapak Arifin dan jajarannya sudah menghasilkan sesuatu yang dapat di contoh oleh pekon-pekon lain. Ikut sertanya pemimpin pekon dalam pelaksanaan acara rutin yang di dukung oleh pemerintah dan dijalankan oleh para orang penting dalam pekon juga memberikan motivasi baik untuk pemuda-pemudi dalam mengikuti acara Adat yang lahir sejak zaman nenek moyang itu. Mereka menyadari pekon lintik harus menjadi pekon yang maju dan tetap mengembangkan apa yang menjadi peninggalan dari nenek moyang terdahulu. Pekon Lintik memang di kuasai oleh penduduk asli yang mayoritas Lampung Sai Batin dan sangat menjunjung tinggi adat istiadat.

## 5. Politik

Politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat kearah kehidupan bersama yang harmonis. Usaha untuk menggapai *The Good Life* ini menyangkut berbagai macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan itu. Masyarakat mengambil keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu dan hal ini menyangkut pilihan antara

---

<sup>68</sup> <sup>68</sup> Thoibi, Tokoh Adat Dan Tokoh Agama Pekon Lintik Kecamatan Krui Selatankabupaten Pesisir Barat (wawancara pribadi pada tanggal 15 juli 2017)

beberapa alternatif serta urutan prioritas dan tujuan-tujuan yang telah ditentukan itu.<sup>69</sup>

Dalam segi politik di pekon Lintik yang sesuai dengan hasil observasi dan wawancara kepada masyarakat termasuk tokoh adat dan sekretaris pekon mengatakan hal yang sama dan tidak jauh berbeda dengan hasil sebelumnya yaitu Arifin peratin pekon Lintik mengatakan:

“iya, jadi mengenai politik di pekon Lintik ini tidak terlalu dominan dan panas ketika adanya pemilihan-pemilihan umum baik tingkat pekon, kecamatan, kabupaten/kota serta provinsi. Tetapi memang pasca pemekaran wilayah dinamika politik, memang mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Jadi jelas bukan pemekaran Desa di pekon Lintik juga berdampak baik bagi politik yang ada di pekon Lintik, tapi memang keadaan ini belum begitu baik layak nya pekon-pekon lain yang sudah memiliki struktur dan sistem yang baik. Tapi bapak yakin seiring berjalannya waktu semua masalah yang ada dapat di atasi secara baik.”<sup>70</sup>

Seiring dengan perubahan dinamika politik dan sisitem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang di pandang lebih demokratis. Jabatan Peratin sejak lama ditentukan dengan cara dipilih secara lansung oleh masyarakat Pekon Lintik . Biasanya para calon peratin yang akan ikut pemilihan peratin adalah orang yang punya kaitan dengan elit lama pekon tersebut. Misalnya anak peratin terdahulu atau turunan dan keluarganya peratin merupakan suatu jabatan yang tidak serta merta dapat ditawarkan kepada putra seorang peratin. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa yang akan menjadi peratin adalah orang luar

<sup>69</sup> Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 15.

<sup>70</sup> Arifin, peratin pekon Lintik kecamatan krui selatan kabupaten pesisir barat (wawancara pribadi pada tanggal 23 mei 2017)

bahkan bukan dari keturunan peratin yang lama. Thoibi tokoh agama juga tokoh adat/petua pekon Lintik mengatakan:

“siapa saja bisa menjadi pemimpin di pekon ini tidak menutup kemungkinan orang biasa pun bisa asalkan memenuhi syarat yang memang di tentukan. Tidak masalah ia lahir dari kalangan yang seperti apa karena yang kita butuhkan kedepan adalah pemimpin yang baik, jujur, dan bertanggung jawab.”<sup>71</sup>

Hasil wawancara peneliti kepada peratin pekon Lintik yaitu bapak Arifin juga bapak Thoibi selaku ketua adat memiliki kesinambungan dan menjawab dengan baik bahwa memang jabatan sebagai pemimpin Pekon dapat diberikan kepada siapaun asalkan memenuhi syarat yang sudah di berlakukan. Jabatan peratin tidak harus dari kalangan elit, anak pejabat, bahkan tidak membedakan status sosial satu dengan yang lain baik suku, ras dan agama. Siapa saja berhak menjadi pemimpin, karena yang masyarakat butuhkan adalah sosok pemimpin yang baik, jujur dan bertanggung jawab penuh atas urusan masyarakat nya dan tidak menutup kemungkinan bahwa tetap mendahulukan kepentingan masyarakat nya daripada kepentingan pribadi.

## 6. Agama

Tujuan agama adalah memberikan petunjuk pada manusia, sehingga dengan kekuatan petunjuk agama akan menyampaikannya menuju ke-haribaan Ilahi. Jika demikian, maka agama adalah perantara dalam membantu tugas manusia untuk merealisasikan tujuan mulianya. Dengan dasar ini, tidaklah mungkin digambarkan bahwa bagaimana mungkin ketika agama muncul manusia

---

<sup>71</sup> Thoibi tokoh agama juga tokoh adat/petua pekon Lintik (wawancara pribadi pada tanggal 15 juli 2017)

menjadikan tebusan dan pengorbanan pada dirinya. Jika seandainya manusia tidak berpegang pada prinsip agama, tidak menjadikan kesempurnaan kekuatan ruh agama.

Dalam segi agama masyarakat pekon Lintik selalu mengutamakan hal-hal yang berlandaskan agama karena menurut mereka agama bukanlah formal saja yaitu cara beragama berdasarkan formalitas yang berlaku di lingkungannya atau masyarakatnya. Cara ini biasanya mengikuti cara beragamanya orang yang berkedudukan tinggi atau punya pengaruh. Pada umumnya tidak kuat dalam beragama. Mudah mengubah cara beragamanya jika berpindah lingkungan atau masyarakat yang berbeda dengan cara beragamanya. Mudah bertukar agama jika memasuki lingkungan atau masyarakat yang lain agamanya. Mereka ada minat meningkatkan ilmu dan amal keagamaannya akan tetapi hanya mengenai hal-hal yang mudah dan nampak dalam lingkungan masyarakatnya. Tetapi masyarakat pekon Lintik adalah masyarakat yang beragama Tradisional, yaitu cara beragama berdasar tradisi. Cara ini mengikuti cara beragama nenek moyang, leluhur, atau orang-orang dari angkatan sebelumnya. Pemeluk cara agama tradisional pada umumnya kuat dalam beragama, sulit menerima hal-hal keagamaan yang baru atau pembaharuan, dan tidak berminat bertukar agama. Terlebih lagi masyarakat pekon Lintik sangat menjunjung tinggi Adat Istiadat yang menggunakan cara-cara yang juga diajarkan oleh agama terlebih agama islam karena masyarakat yang mayoritas agama islam seperti, berpakaian sopan, bertutur kata sopan kepada sesamanya, sangat hormat kepada yang lebih tua dan itu ajaran-ajaran yang

diwariskan oleh para leluhurnya. Thoibi tokoh agama juga tokoh adat/petua pekon

Lintik mengatakan:

“Agama yang masyarakat anut di pekon Lintik itu mayoritas beragama islam dan mayoritas juga bersuku lampung sai batin, yang dimana adat istiadat yang masyarakat sangat junjung tinggi. Bukan hanya ajaran agama islam saja yang mengharuskan untuk menutup aurat bagi perempuan tapi memang dari nenek moyang kami dulu juga mengajarkan itu, selain itu juga agama mengajarkan untuk berbicara sopan kepada yang lebih tua.”<sup>72</sup>

Pemekaran Desa yang terjadi di pekon lintik juga berdampak terhadap agama yang berkaitan dengan adat istiadat yang ada di pekon lintik dan untuk memberikan kesempurnaan terhadap agama masyarakat yang meneruskan adat nenek moyang terdahulu percaya bahwa agama dan adat yang ada harus berkesinambungan/ beriringan satu dengan yang lain tanpa harus dipisahkan. Terlihat bahwa tujuan keduanya adalah sama dan jalan akhir keduanya sama. Pendekatan pembangunan daerah yang dilakukan secara nyata dan didukung dengan komitmen serta konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan diharapkan sejumlah masalah jangka pendek dan menengah yang sedang dihadapi pekon Lintik dapat dipecahkan. Sudah tentu, konsistensi dan komitmen pemerintah untuk mewujudkan seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sangat dibutuhkan.

- i. Berorientasi pada masyarakat.
- j. Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat

---

<sup>72</sup> Thoibi tokoh agama juga tokoh adat/petua pekon Lintik (wawancara pribadi pada tanggal 15 juli 2017)

k. Sesuai Dengan Adat Dan Budaya Masyarakat

l. Berwawasan Lingkungan

m. Tidak Diskriminatif

n. Kemitraan

o. Berbasis Pemerintahan Yang Bersih

p. Anggaran Berbasis Kinerja

Dari sudut pandang pembangunan, kemajuan dan ketersediaan teknologi baru dapat kita lihat dari sisi, bagaimana akibat kemajuan suatu daerah bagi upaya meningkatkan kehidupan sebagian besar masyarakat yang selama ini telah tinggal dan menetap di daerah yang terbelakang dibandingkan dengan masyarakat yang hidup di daerah maju.<sup>73</sup>

Agama masyarakat pedesaan cenderung lebih baik dibandingkan dengan agama yang ada di perkotaan. Karena masyarakat pedesaan sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan berkaitan dengan ajaran agama. Pekon Lintik adalah pekon yang didalamnya terdapat tokoh adat dan juga sebagai tokoh agama yang terkenal memberikan motivasi baik terhadap sesamanya, motivasi yang diberikan tokoh adat serta agama tersebut memang dapat diterima masyarakat sebagai bentuk hormat kepada petua pekon. Percepatan dan pemerataan pembangunan akan berjalan baik apabila semua pihak yang bersangkutan dapat saling menerima dan tidak merasa terbebani dengan adanya pembangunan-pembangun yang pemerintah berikan. Masyarakat bukan menolak adanya

---

<sup>73</sup> Zulkarimen Nasution, *Komunikasi Pembangunan*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 224.

pembangunan pekon demi percepatan dan pemerataan pembangunan namun masyarakat sangat menunggu dan pasti menerima dengan semua kebijakana-kebijakan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat terlebih yang dibutuhkan masyarakat untuk terus maju dan berkembang.

Strategi penting yang akan mendukung program pembangunan daerah yaitu adanya pembenahan. Pembenahan dibutuhkan untuk reformasi di bidang pemerintahan. Pada tahapan ini, pembenahan akan diarahkan pada reformasi institusional, mekanisme dan kinerja pelayanan dari berbagai institusi publik berdasarkan prinsip *good governance* dan *clean government* sehingga semua institusi ini dapat berperan optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aspek lain yang akan dibenahi antara lain, Regulasi-regulasi daerah yang dinilai tidak relevan dengan penyelenggaraan otonomi daerah akan disesuaikan dan pada saat bersamaan regulasi baru yang akan mendukung percepatan pembangunan daerah. Selain itu, pembenahan terkait dengan struktur pemerintahan dan kondisi wilayah sehubungan dengan pemekaran-pemekaran wilayah baru seperti kabupaten, kota, propinsi bahkan desa perlu dilakukan.

Dalam BAB II juga dijelaskan bahwa adanya konsep dan strategi yaitu *Kebijakan Privatisasi, Pembangunan Infrastruktur Investasi, dan Jaringan Kerja Pemberdayaan*. Konsep ini bertujuan untuk mempermudah percepatan dan pemerataan pembangunan daerah karena masing-masing bagian memiliki tugas tersendiri. Pada akhirnya, strategi dan aksi percepatan pembangunan daerah sangat berdampak kepada percepatan pembangunan dan bergantung pada tiga



variabel utama, yaitu pemerintah daerah, investor dan rakyat Daerah itu sendiri. Pihak Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap kebijakan pembangunan yang diambil.

### **C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan**

#### **a. Faktor Pendukung Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan**

Adapun faktor pendukung percepatan dan pemerataan pembangunan daerah menurut hasil wawancara peneliti yaitu, Arifin peratin pekon Lintik mengatakan:

“sudah pasti yang pertama adalah UU yang mengarah kepada pembangunan dalam pemerintahan, nanti kamu cari saja di data yang bapak sekretaris berikan untuk kelengkapan jawaban bapak , dan yang kedua tentu adalah dukungan dari masyarakat atas kebijakan-kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah, dan yang ketiga adalah suasana lingkungan pekon yang konsumtif sehingga mempermudah jalannya pelaksanaan pembangunan”<sup>74</sup>

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan bapak peratin pekon Lintik Kecamatan krui Selatan Kabupaten pesisir Barat mengandung tiga pokok penting yang menjadi faktor pendukung dalam percepatan dan pemerataan pembangunan daerah pasca pemekaran wilayah yaitu sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Atas

---

<sup>74</sup> Arifin, peratin pekon Lintik, kecamatan Krui Selatan kabupaten Pesisir Barat (wawancara pribadi tanggal 23 mei 2017)

kebijakan tersebut Kabupaten Pesisir Barat dapat melakukan pembangunan infrastruktur diberbagai wilayah kecamatan dan Desa termasuk pekon Lintik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan daerah.

2. Dukungan seluruh warga terhadap kebijakan pemerintah melalui usulan-usulan yang disampaikan kepada pemerintah Kabupaten dan pemerintah Kecamatan mengenai perlunya pembangunan infrastruktur di Pekon Lintik, dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan daerah.
3. Kondusifnya suasana dan lingkungan masyarakat sehingga pembangunan infrastruktur di pekon Lintik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat dapat dilaksanakan.

b. Faktor penghambat percepatan dan pemerataan pembangunan

Tentu saja ketika kita berbicara tentang pengaruh, dampak positif dan dampak negatif pasti juga muncul faktor pendukung dan faktor penghambat semua telah kita bahas di halaman-halaman sebelumnya dan di bagian terakhir dari **ANALISIS PERCEPATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAERAH PASCA PEMEKARAN DESA DI KABUPATEN PESISIR BARAT STUDI KASUS PEKON LINTIK KECAMATAN KRUI SELATAN KABUPATEN PESISIR BARAT** ini adalah faktor penghambat percepatan dan pemerataan pembangunan daerah. Muzanni Sekretaris pekon Lintik mengatakan:

“iya, jadi ada beberapa faktor yang menjadi penghambat percepatan dan pemerataan pembangunan di pekon Lintik yang pertama, Terbatasnya anggaran belanja daerah untuk bidang pembangunan infrastruktur, yang kedua terbatasnya SDM, Rendahnya aksesibilitas transportasi ke lokasi yang akan dibangun, Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur yang disediakan pemerintah, sehingga kondisinya cepat rusak dan yang terakhir Faktor pendanaan yang sering terlambat. Ya kurang lebih seperti itu saya sebagai sekretaris dan juga masyarakat yang mengetahui banyak tentang perkembangan semua pembangunan yang ada di pekon Lintik saya merasakan sulitnya proses pencapaian pembangunan yang tepat waktu itu. Alhamdulillah semua hambatan-hambatan itu dapat di lewati dengan baik. dan hasilnya pun kini telah dirasakan oleh masyarakat dan saya sendiri.”<sup>75</sup>

Hasil wawancara terhadap sekretaris pekon yaitu dengan bapak muzanni yang peneliti wawancara pada tanggal 23 mei 2017 yaitu menghasilkan beberapa faktor penghambat dalam percepatan dan pemerataan pembangunan daerah di pekon Lintik pasca pemekaran Desa yaitu sebagai berikut:

1. Terbatasnya anggaran belanja daerah untuk bidang pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, kantor peratin, pasar, dan jembatan, sehingga percepatan dan pemerataan pembangunan daerah belum dapat diaktualisasikan.
2. Terbatasnya kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki oleh para kontraktor sehingga hasil pembangunan infrastruktur kurang optimal.
3. Rendahnya aksesibilitas transportasi ke lokasi yang akan dibangun infrastrukturnya sehingga diperlukan biaya yang lebih besar.

---

<sup>75</sup> Muzanni, sekretaris pekon Lintik (wawancara pribadi pada tanggal 23 mei 2017)

4. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur yang disediakan pemerintah, sehingga kondisinya cepat rusak.
5. Faktor pendanaan yang sering terlambat sehingga seringkali proyek pembangunan terhenti sehingga tidak mencapai target waktu dari pembangunan tersebut.

Percepatan dan pemerataan pembangunan dalam suatu daerah memang harus di tindak lanjuti dengan baik. Apabila suatu daerah memiliki latar belakang daerah yang tebelakang dan diperlukannya pembangunan maka pemerintah harus memperhatikan apakah pembangunan tersebut sudah berjalan dengan sebaik mungkin atau malah pembangunan yang berjalan harus terhenti dan tidak di tindak lanjuti dengan baik. Kerugian jika suatu daerah gagal dalam mempercepat pembangunan akan berimbas kepada masyarakat dan juga perekonomian daerah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil analisa dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan adanya pemekaran tentu sangat berpengaruh terhadap proses dan kontrol pemerintahan dalam mengevaluasi pembangunan di daerah pemekaran, termasuk didalamnya pengawasan terhadap pembangunan ditingkat Pekon/Desa. Pekon/Desa adalah wilayah pemerintah terkecil akan tetapi mempunyai pengaruh yang signifikan bagi pelaksanaan pemerintahan di atasnya. Dengan baiknya kondisi pemerintahan pekon Kabupaten Pesisir Barat akan lebih mendapatkan perhatian lebih hal tersebut sangat memberikan pengaruh pada pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.
2. Peneliti mengambil kesimpulan sesuai dengan hasil wawancara dan observasi tentang dampak pemekaran Desa terhadap percepatan dan pemerataan pembangunan sebagai berikut:
  1. Pelayanan Administrasi pemerintahan
  2. Infrastruktur
  3. Ekonomi
  4. Sosial budaya
  5. Politik
  6. Agama

### 3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan

#### a. Faktor Pendukung Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan

1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004
2. Dukungan seluruh warga terhadap kebijakan pemerintah
3. Kondusifnya suasana dan lingkungan masyarakat

#### b. Faktor penghambat percepatan dan pemerataan pembangunan

1. Terbatasnya anggaran belanja daerah untuk bidang pembangunan infrastruktur
2. Terbatasnya kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki oleh para kontraktor
3. Rendahnya akses transportasi ke
4. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur yang disediakan pemerintah,.
5. Faktor pendanaan.

## B. SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka saran

dari penelitian ini adalah:

1. Pemerintah seharusnya dalam hal ini dapat memberikan perhatian terhadap masyarakat yang ingin ikut serta mendorong pembangunan daerah demi kemudahan dan kelancaran semua aktivitas masyarakat sehari-hari.

2. Pemerintah diharuskan lebih memantau setiap tugas yang diberikana kepada anggotanya agar semua pekerjaan terlaksana dengan baik dan semua pembangunan berjalan dengan cepat sehingga percepatan dan pemerataan daerah tidak lagi terkendala.
3. Pemerintah juga diharapkan mengusahakan pembangunan secara maksimal dengan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat menunjang kearah pembangunan yang lebih baik. Merancang perencanaan pembangunan yang tidak hanya dilakukan di daerah perkotaan saja, tetapi juga untuk daerah yang baru dimekarkan.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Afiffuddin, *Pengantar Administrasi Pembangunan: Konsep, Teori dan Implikasinya di Era Reformasi*, (Bandung: Alfabeta, 2010), cet. Ke-1
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Bina Aksara, 2002).
- Azhari , Syafiie Inu Kencana, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2012).
- Budiarjo Miriam, *Dasar-dasar ilmu politik*, (Jakarta : PT Ikrar mandiri abadi, 2008).
- Departemen pendidikan dan kebudayaan, kamus besar bahasa indonesia, (Jakarta : balai pustaka, 2000).
- Bimo Walgito, *Metode-Metode Penelitian*, (Bogor : Raja Grafindo Persada, 2010).
- Ghaffar Affan, *Otonomi Daerah Dala Negara Kesatuan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009).
- Haeruman. 1996. *Pembangunan Daerah dan Peluang Pemerataan Pembangunan Antar Daerah*, ( Jakarta : Prisma No. Khusus 25 Tahun (1971-1996).
- Hasan M. Iqbal, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2002).
- Hasibuan Albert, *Otonomi Daerah (Peluang dan Tantangan)*, (Jakarta: Swadaya, 1995).
- Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : Manjar Maju, 1996)
- Kuncoro mudrajad ,*Otonomi Pembangunan Daerah*, (Jakarta : Erlangga, 2004).
- Maksudi Beddy irawan, *sistem politik indonesia*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2013).

Nawawi Hadar, *Metode Penelitian Bidang Social*, (Yogyakarta : Gama Press, 1987).

Siska Yuke Hardian, *pertumbuhan dan perkembangan remaja*, (Edisi Kesatuan, PKBI, Jakarta, 1999)

Sudjana, *Metode Statistika*, (Bandung : Tarsito, 2005).

Soejatmiko, " *Problems And Prospects For Development In Indonesia*", (Asia. No.5, Oktober 1972).

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : Alfabeta, 2009).

Ubaedillah dkk (ed), *Pendidikan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi manusia, dan Masyarakat madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2008), Edisi Ketiga.

Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2016, *Tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan, Dan Pemekaran Daerah Otonom*, jakarta.

Profil pekan Lintik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir barat 2017.

Widjaja Haw, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, (Jakarta : Rajawali Pers. 2011).

## B. SUMBER LAIN

<http://nurwangawoh.blogspot.co.id/2012/04/kabupaten-pesisir-baratlampung.html> (diakses pada tanggal 15 oktober 2016).

[http://jipsi.fisip.unikom.ac.id/\\_s/data/jurnal/volume-02/samugyo-ibnuredjo.pdf/pdf/samugyo-ibnu-redjo.pdf](http://jipsi.fisip.unikom.ac.id/_s/data/jurnal/volume-02/samugyo-ibnuredjo.pdf/pdf/samugyo-ibnu-redjo.pdf) (di akses pada tanggal 26 juli 2017).

<http://rachmatdwimulya.blogspot.co.id/2014/09/konseppemerataanpembangunan-daerah.html> (di akses pada taggal 26 juli 2017).

Data Pekan Lintik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat

Naskah rencana pembangunan jangka menengah desa tahun 2016-2017 pekon  
Lintik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat



## DAFATAR PUSTAKA

### A. BUKU

Afiffuddin, *Pengantar Administrasi Pembangunan: Konsep, Teori dan Implikasinya di Era Reformasi*, (Bandung: Alfabeta, 2010), cet. Ke-1

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Bina Aksara, 2002).

Azhari , Syafiie Inu Kencana, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2012).

Budiarjo Miriam, *Dasar-dasar ilmu politik*, (Jakarta : PT Ikrar mandiri abadi, 2008).

Departemen pendidikan dan kebudayaan, kamus besar bahasa indonesia, (Jakarta : balai pustaka, 2000).

Bimo Walgito, *Metode-Metode Penelitian*, (Bogor : Raja Grafindo Persada, 2010).

Ghaffar Affan, *Otonomi Daerah Dala Negara Kesatuan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009).

Haeruman. 1996. *Pembangunan Daerah dan Peluang Pemerataan Pembangunan Antar Daerah*, ( Jakarta : Prisma No. Khusus 25 Tahun (1971-1996).

Hasan M. Iqbal, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2002).

Hasibuan Albert, *Otonomi Daerah (Peluang dan Tantangan)*, (Jakarta: Swadaya, 1995).

Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : Manjar Maju, 1996)

Kuncoro mudrajad ,*Otonomi Pembangunan Daerah*, (Jakarta : Erlangga, 2004).

Maksudi Beddy irawan, *sistem politik indonesia*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2013).

Nawawi Hadar, *Metode Penelitian Bidang Social*, (Yogyakarta : Gama Press, 1987).

Siska Yuke Hardian, *pertumbuhan dan perkembangan remaja*, (Edisi Kesatuan, PKBI, Jakarta, 1999)

Sudjana, *Metode Statistika*, (Bandung : Tarsito, 2005).

Soejatmiko, " *Problems And Prospects For Development In Indonesia*", (Asia. No.5, Oktober 1972).

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : Alfabeta, 2009).

Ubaedillah dkk (ed), *Pendidikan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi manusia, dan Masyarakat madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2008), Edisi Ketiga.

Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2016, *Tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan, Dan Pemekaran Daerah Otonom*, jakarta.

Profil pekan Lintik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir barat 2017.

Widjaja Haw, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, (Jakarta : Rajawali Pers. 2011).

## **B. SUMBER LAIN**

<http://nurwangawoh.blogspot.co.id/2012/04/kabupaten-pesisir-baratlampung.html>  
(diakses pada tanggal 15 oktober 2016).

[http://jipsi.fisip.unikom.ac.id/\\_s/data/jurnal/volume-02/samugyo-ibnuredjo.pdf/pdf/samugyo-ibnu-redjo.pdf](http://jipsi.fisip.unikom.ac.id/_s/data/jurnal/volume-02/samugyo-ibnuredjo.pdf/pdf/samugyo-ibnu-redjo.pdf) (di akses pada tanggal 26 juli 2017).

<http://rachmatdwimulya.blogspot.co.id/2014/09/konseppemerataanpembangunan-daerah.html> (di akses pada taggal 26 juli 2017).

Data Pekon Lintik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat

Naskah rencana pembangunan jangka menengah desa tahun 2016-2017 pekon  
Lintik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

*Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. (0721) 703260*

---

**RESUMEN TRANSKIP HASIL WAWANCARA (SELASA, 23 MEI 2017  
PADA PUKUL 09.45 WIB DIKEDIAMAN BAPAK PERATIN PEKON  
LINTIK YAITU BAPAK ARIFIN)**

**I. Identitas Responden I**

1. Nama : ARIFIN
2. Umur : 37 Tahun
3. Pekerjaan : Swasta
4. Jabatan : Peratin Pekon Lintik, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat
5. Jenis Kelamin : laki-laki
6. Alamat : Jl. Jendral Suprpto No. 28 Pekon Lintik, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat.

**II. Hasil Wawancara**

Penulis : Apa yang bapak ketahui tentang gambaran pembangunan pekon sebelum pemekaran Desa di Pekon Lintik Kabupaten Pesisir Barat?

Arifin : iya, jadi Pekon Lintik ini adalah Pekon yang konon kata orang zaman dulu adalah pekon yang indah dan lentik, makanya disebut pekon Lintik. Mengenai pembangunan Pekon Lintik sebelum pemekaran Desa pun pekon mengalami pembangunan yang kurang baik, mulai dari pembangunan infrastruktur maupun pembangunan lain banyak terhenti. Pembangunan di Pekon Lintik dapat dikatakan lambat karena pembangunan jembatan yang seharusnya selesai tepat waktu harus terhenti dengan banyak kendala dan hambatan, sulitnya masyarakat dalam pembagian bantuan yang masuk pekon dikarenakan kantor peratin yang jauh dan akses jalan yang rusak dan perlunya pembenahan.

Penulis : Tahun berapakah bapak pemekaran Desa di Pekon Lintik Kabupaten Pesisir Barat?

Arifin : Tanggal 03 mei tahun 2010

Penulis : Hal apa saja bapak yang memicu pemekaran Desa di Pekon Lintik Kabupaten Pesisir Barat?



- Arifin : Banyaknya keluhan masyarakat yang ingin mempermudah akses dan menginginkan pekon mereka sama dengan yang lain, sesuai dengan kriteria dan syarat untuk dilakukannya pemekaran Desa, luas wilayah yang sangat mendukung untuk dilakukannya pemekaran dan pekon Lintik juga di harapkan dapat memberikan pembangunan yang cepat serta merata sehingga mempermudah aktivitas masyarakat
- Penulis : Bagaimana bapak Pengaruh Pemekaran Desa terhadap percepatan dan pemerataan pembangunan di Pekon Lintik?
- Arifin : iya, pemekaran Pekon Lintik ini dimekarkan karena alasan ekonomi. Dimana pemekaran Desa diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah serta pemerataan dalam daerah, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dijadikan alasan karena adanya kendala geografis maupun infrastruktur. Dan alasan keadilan, bahwa pemekaran Desa dijadikan untuk mendapatkan keadilan. Artinya, pemekaran Desa diharapkan akan menciptakan keadilan terutama dalam pembangunan. Lebih kurang seperti itu.
- Penulis : Motivasi apa menurut bapak yang melatarbelakangi pemekaran Desa di Pekon Lintik Kabupaten Pesisir Barat?
- Arifin : Iya jadi masalah pemekaran Desa yang akan menghasilkan manfaat bagi pemerintah, masyarakat dan kemajuan bagi Pekon Lintik dan banyak nya dukungan yang mengarah pada pemekaran Desa pada saat itu. Dengan maksud potensi yang ada di pekon ini dapat terus tergali dengan baik dan akan memberikan nilai ekonomi lebih agi masyarakat.
- Penulis :Apa saja bapak manfaat dari pemekaran Desa yang terjadi di Pekon Lintik Kabupaten pesisir Barat?
- Arifin :Mempermudah semua urusan masyarakat.
- Penulis :Bagaimana bapak kondisi sosial budaya saat ini pasca pemekaran Desa di Pekon Lintik?
- Arifin : Untuk sosial budaya yang ada saat ini alhamdulillah selalu di dukung penuh oleh tokoh adat yang sekaligus tokoh agama jadi semua kegiatan adat, agama, bahkan sosial di pimpin oleh beliau. Namun terkadang tidak menutup kemungkin di bagian sosial saya sendiri yang mengarahkan masyarakat untuk terus melakukan kegiatan sosial rutin seperti gotong royong, ronda, dan nayuh-nayuh adat. Masyarakat di Pekon Lintik tidak pernah membandingkan sttus sosial masing-masing karena sejauh ini Pekon Lintik tetap aman tanpa konflik yang besar.

- Penulis : Bagaimana bapak kondisi Keagamaan yang ada di pekon ini?  
Arifin : iya dari segi agama Pekon Lintik mayoritas beragama islam dan memiliki tokoh agama yang juga tokoh adat yang dari dulu nyampek sekaran masih mendukung penuh kegiatan ber'agama dan sekalian berhubungan dengan kegiatan sosial yang rutin dilakukan.
- Penulis : Bagaimana bapak kondisi sosial politik nya di Pekon Lintik?  
Arifin : iya, jadi mengenai politik di Pekon Lintik ini tidak terlalu dominan dan panas ketika adanya pemilihan-pemilihan umum baik tingkat pekon, kecamatan, kabupaten/kota serta provinsi. Tetapi memang pasca pemekaran Desa dinamika politik, memang mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Jadi jelas bahwa pemekaran Desa di pekon Lintik juga berdampak baik bagi politik yang ada di Pekon Lintik, tapi memang keadaan ini belum begitu baik layak nya pekon-pekon lain yang sudah memiliki struktur dan sistem yang baik. Tapi bapak yakin seiring berjalannya waktu semua masalah yang ada dapat di atasi secara baik.
- Penulis : Bagaimana bapak kondisi ekonomi di pekon Lintik saat ini apakah  
Arifin : pasca pemekaran mengalami penurunan atau sebaliknya?  
: Pekon Lintik memiliki banyak sekali lapangan pekerjaan yaitu selain masyarakat yang memang bekerja sebagai pejabat pemerintahan juga hasil pekon yang dapat di kelola adalah hasil perkebunan, nelayan, petani dan pariwisata. Hasil perkebunan yaitu damar dan cengkeh tetapi kendala besar masyarakat adalah kebun yang jauh dari rumah menyebabkan masyarakat lebih banyak tidak mengurus kebun dan memiliki pekerjaan lain. Nelayan, masyarakat pekon Lintik juga menggeluti pekerjaan sebagai nelayan meski hasil tidak terlalu banyak tetapi menguntungkan bagi masyarakat setempat. Sebagian besar masyarakat adalah berpropesi sebagai petani padi, karena pekon Lintik termasuk pekon yang terletak di perbatasan persawahan yang lebar. Di bagian pariwisata pantai dipekon lintik memiliki keindahan yang luar biasa tetapi untuk saat ini area pantai sedang di tutup karena ombak yang tinggi menjadi kendala. Saya mendukung penuh untuk penutupan itu karena membahayakan pengunjung apalagi kebanyakan kan bujang gadis. Ya takutnya ada hal negatif yang terjadi.
- Penulis : Bagaimana bapak menyikapi pemekaran wilayah yang terjadi di  
Pekon Lintik?  
Arifin : saya selaku peratin di Pekon Lintik saat ini merasa senang dapat memberikan yang terbaik untuk pekon ini. Percepatan dan pemerataan pembangunan memang sebaiknya harus di teliti dengan baik

bagaimana perkembangan disetiap pembangunan yang sedang berlangsung.

Penulis : Bagaimana bapak dampak pemekaran Desa terhadap percepatan dan pemerataan pembangunan di pekon Lintik?

Arifin : Pemekaran Desa memberikan dampak yang baik dalam percepatan dan pemerataan pembangunan. pembangunan yang sempat terhenti karena berbagai kendala akhirnya mampu memberikan hasil baik bagi pekon Lintik pasca pemekaran Desa.

Penulis : Apa faktor penghambat dan pendukung percepatan dan pemerataan pasca pemekaran Desa di Pekon Lintik ?

Arifin : Faktor pendukung nya “sudah pasti yang pertama adalah UU yang mengarah kepada pembangunan dalam pemerintahan, nanti kamu cari saja di data yang bapak sekretaris berikan untuk kelengkapan jawaban bapak , dan yang kedua tentu adalah dukungan dari masyarakat atas kebijakan-kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah, dan yang ketiga adalah suasana lingkungan pekon yang kondusif sehingga mempermudah jalannya pelaksanaan pembangunan”. Faktor penghambat nya “iya, yang paling besar itu faktor ekonomi karena percepatan pembangunan di suatu daerah akan berjalan sesuai dengan harapan apabila dana yang di anggarkan mampu diberikan dengan sebaik mungkin.

Penulis : Sebagai orang No 1 di pekon ini Apa harapan bapak kedepannya untuk pekon yang bapak pimpin saat ini yaitu pekon Lintik?

Arifin : Saya pribadi berharap untuk kemajuan semua pembangunan yang sudah di realisasikan sejak lama namun masih terhambat. Memberikan sarana dan prasarana yang di butuhkan oleh masyarakat. Dan saya berharap semoga selalu amanah dalam memimpin Pekon Lintik agar lebih maju.

Penulis : Cukup sekian terimakasih Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Arifin : Wa’alaikum salam warah matullahi wabarakatuh



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

*Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. (0721) 703260*

---

**RESUMEN TRANSKIP HASIL WAWANCARA (SABTU, 15 JULI 2017 PADA  
PUKUL 10.30 WIB DIKEDIAMAN BAPAK NUR ARIFIN)**

**III. Identitas Informan II**

- 7. Nama : NUR ARIFIN
- 8. Umur : 45 Tahun
- 9. Pekerjaan : PEDAGANG
- 10. Jabatan : Masyarakat Pekon Lintik, Kecamatan  
Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat
- 11. Jenis Kelamin : Laki-laki
- 12. Alamat : Jl. Jendral Suprpto No.32 Pekon Lintik, Kecamatan  
Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat.

**IV. Hasil Wawancara**

- Penulis : Apa yang bapak ketahui tentang gambaran pembangunan pekon sebelum pemekaran Desa di pekon Lintik Kabupaten Pesisir Barat?
- Nur Arifin : Pekon Lintik itu sebelum pemekaran masih banyak yang harus dilakukannya pembangunan, yang paling utamapembangunan jalan dan jembatan, bukan tidak ada jalan tetapi keadaan jalan yang rusak parah pada saat itu.
- Penulis : Tahun berapakah bapak pemekaran Desa di Pekon Lintik Kabupaten Pesisir Barat?
- Nur Arifin : 2010
- Penulis : Apa saja bapak manfaat dari pemekaran Desa yang terjadi di Pekon Lintik Kabupaten Pesisir Barat?
- Nur Arifin : Alhamdulillah dampaknya ya saya dan keluarga senang, karena sekarang pembagian beras raskin sudah tepat waktu gak kayak dulu yang harus nunggu giliran karena per 20 kepala keluarga jadi gak setiap bulan dapatnya. Kebetulan saya gak punya sawah mbak jadi beras beli terus kalau ada beras raskin kan bisa mengurangi beban saya sedikit gitu, dan yang lebih saya syukuri adalah pembangunan jembatan penghubung pekon Lintik dan pekon Padang Haluan itu

sangat membantu saya karena kebetulan saya berjualan di pantai WALUR jadi jembatan itu sangat membantu mempercepat perjalanan saya. ya intinya pemekaran Desa itu berdampak positif buat saya dan keluarga semua alhamdulillah.

Penulis : Bagaimana bapak kondisi sosial budaya saat ini pasca pemekaran Desa di Pekon Lintik?

Nur Arifin : Sosial budaya di Pekon Lintik ini masih kental acara-acara adat nya yaitu mayoritas Lampung Sai batin dan jiwa sosial masyarakat juga tinggi.

Penulis : Bagaimana bapak kondisi Keagamaan yang ada di Pekon ini?

Nur Arifin : Agama bagi masyarakat adalah yang paling utama, begitu juga dengan kegiatan yang menyangkut agama masih kental karena alhamdulillah para tokoh agama yang sampai saat ini masih ada.

Penulis : Bagaimana bapak kondisi sosial politik nya di Pekon Lintik?

Nur Arifin : Iya jadi kalau dari segi politik saya tidak banyak tau ya mbak tetapi sejauh ini tidak ada konflik dan masih aman-aman saja dari sebelumnya juga.

Penulis : Bagaimana bapak kondisi ekonomi di Pekon Lintik saat ini apakah pasca pemekaran mengalami penurunan atau sebaliknya?

Nur Arifin : Iya, jadi kalau masalah ekonomi di pekon Lintik jauh perbandingannya sebelum dan sesudah pemekaran Desa. Pekon Lintik saat ini memiliki potensi ekonomi yang banyak tergali jadi sebagian masyarakat ikut serta dalam program pemerintah dan banyak bantuan seperti alat bajak sawah untuk mempermudah petani ada juga di bagian pariwisata mulai mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah untuk menarik peminat pengunjung dan tentu menghasilkan bagi masyarakat.

Penulis : Bagaimana bapak menyikapi pemekaran Desa yang terjadi di Pekon Lintik ini?

Nur Arifin : Pemekaran Desa, memiliki dampak positif baik bagi masyarakat maupun daerah nya sendiri karena di harapkan mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Saya sebagai warga masyarakat ikut senang karena adanya pemekaran Desa di Pekon Lintik.

Penulis : Apa yang bapak/ibu rasakan sebelum dan sesudah pemekaran?

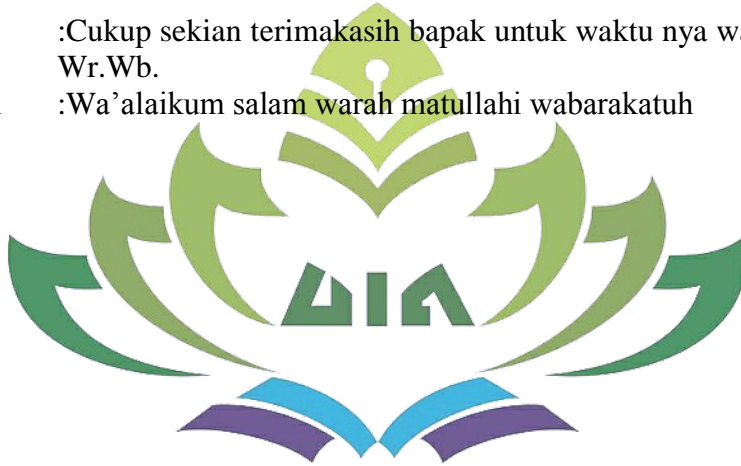
Nur Arifin : Iya, kalau sebelum pemekaran jalannya jelek terus mau bikin KTP aja ribet kan peratinnya jauh, nah kalau sekarang pembangunan nya

merata, cepat, semua urusan yang berkaitan dengan pemerintahan pekon bias dengan mudah diselesaikan.

Penulis : Apa saja harapan bapak setelah pemekaran Desa ini?  
Nur Arifin :Harapan saya semoga kedepannya pekon Lintik menjai Pekon yang maju dan lebih dikenal lagi keindahan pantai nya.

Penulis :Bagaimana bapak dampak pemekaran Desa terhadap percepatan dan pemerataan pembangunan?  
Nur Arifin :Ya, berkaitan dengan dampak yang terjadi pasca pemekaran jujur saya sebagai masyarakat benar merasakan banyak kemudahan baik dari pembangunan jalan, dan pembangunan lainnya” ya alhamdulillah mbak.

Penulis :Cukup sekian terimakasih bapak untuk waktu nya wassalamualaikum, Wr.Wb.  
Nur Arifin :Wa’alaikum salam warah matullahi wabarakatuh





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

*Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. (0721) 703260*

---

**RESUMEN TRASKIP HASIL WAWANCARA (SELASA, 23 MEI 2017 PADA  
PUKUL 14.10 WIB DIKEDIAMAN BAPAK SEKRETARIS PEKON LINTIK  
YAITU BAPAK MUZANNI)**

**V. Identitas Respondenn II**

13. Nama : MUZANNI  
14. Umur : 40 Tahun  
15. Pekerjaan : Swasta  
16. Jabatan : Sekretaris Pekon Lintik, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat  
17. Jenis Kelamin : Laki-laki  
18. Alamat : Jl. Jendral Suprpto No. 13 Pekon Lintik, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat.

**VI. Hasil Wawancara**

- Penulis : Apa yang bapak ketahui tentang gambaran pembangunan pekon sebelum pemekaran Desa di pekon Lintik Kabupaten Pesisir Barat?  
Muzanni : Pembangunan pekon itu berjalan dengan baik setelah pemekaran Desa, jadi sebelumnya memang banyak sekali keluhan yang timbul dari masyarakat mengenai pembangunan yang belum stabil bahkan lama proses pengerjaan nya. Seperti pembangunan Jembatan, jalan, kantor peratin dan pasar, juga pemerataan yang tidak imbang dalam pembagian beras raskin dan peralatan sawah seperti bajak, sanyo dll.singkat nya seperti gambarannya.
- Penulis : Tahun berapakah bapak pemekaran Desa di Pekon Lintik Kabupaten Pesisir Barat?  
Muzanni : 2010
- Penulis : Hal apa saja bapak yang memicu pemekaran Desa di Pekon Lintik Kabupaten Pesisir Barat?  
Muzanni : Banyaknya keluhan masyarakat tentang kurang perhatian pemerintah terhadap Pekon Lintik ini.



- Penulis :Bagaimana bapak Pengaruh Pemekaran Desa terhadap percepatan dan pemerataan pembangunan di Pekon Lintik?
- Muzanni :iya, sebenarnya terbentuknya Pekon Lintik juga sangat dipengaruhi oleh lambatnya pembangunan serta kurangnya perhatian pembangunan dari pemerintah baik dari kecamatan maupun pekon induknya, dan menyebabkan masyarakat merasa kurang diperhatikan terutama dalam hal pembangunan yang jelas bahwa terwujudnya pembangunan akan berimbas kepada lamcarnya masyarakat dalam beraktivitas, selain itu faktor luas wilayah juga sangat mendukung untuk dibentuknya pekon Lintik, Kec. Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.
- Penulis :Motivasi apa menurut bapak yang melatarbelakangi pemekaran Desa di Pekon Lintik Kabupaten Pesisir Barat?
- Muzanni : -
- Penulis :Apa saja bapak manfaat dari pemekaran Desa yang terjadi di Pekon Lintik Kabupaten Pesisir Barat?
- Muzanni :Manfaat nya tentu terlihat jelas sekarang terutama saya pribadi sebagai pengurus di Pekon Lintik. Manfaat yang saya rasakan sebagai sekretaris saat ini adalah lebih mudah menjalankan program pemerintah dengan baik karena semua akses sudah terasa lebih mudah.dengan jarak yang tidak lagi jauh baik ke kecamatan maupun kota.
- Penulis :Bagaimana bapak kondisi sosial budaya saat ini pasca pemekaran Desa di pekon Lintik?
- Muzanni :Untuk sosial budaya alhamdulillah meningkat dan tidak keluar dari hal-hal yang akan menimbulkan konflik antar suku dan agama. Masyarakat di pekon Lintik memiliki jiwa sosial yang tinggi dan saling menghargai satu dengan yang lain.
- Penulis :Bagaimana bapak kondisi Keagamaan yang ada di pekon ini?
- Muzanni :Keagamaan juga dipekon Lintik patut di contoh karena kegiatan keagamaan juga berjalan dengan baik pengajian, yasinan dan masjid yang alhamdulillah tidak pernah kosong gak ketang keisi minimal 5-10 orang yang shalat zuhur dan asar setiap harinya.
- Penulis : Bagaimana Bapak/Ibu kondisi sosial politik nya di pekon Lintik
- Muzanni :Sejauh ini politik di pekon Lintik masih sehat dan tidak ada konflik di setiap ada kegiatan politik.
- Penulis :Bagaimana bapak kondisi ekonomi di pekon Lintik saat ini apakah pasca pemekaran mengalami penurunan atau sebaliknya?

- Muzanni :Dari segi ekonomi pekon Lintik memiliki potensi yang cukup menguntungkan seperti hasil dari pertanian, perkebunan, buruh dan yang lebih unggul adalah pariwisata di pekon Lintik yang terkenal dengan keindahan pantainya. Hanya saja perlu ada perhatian khusus dari pemerintah untuk terus menggali potensi-potensi itu yang kelak akan lebih menguntungkan.
- Penulis :Bagaimana bapak menyikapi pemekaran Desa yang terjadi di pekon lintik ini?
- Muzanni :Iya, saya pribadi memberikan apresiasi penuh dengan program-program pemerintah dalam hal pemekaran Desa karena seperti kita ketahui bahwa pemekaran Desa akan memberikan dampak baik bagi daerah yang dimekarkan. Jadi saya sangat setuju dengan adanya pemekaran Desa ini.
- Penulis :Bagaimana bapak dampak pemekaran Desa terhadap percepatan dan pemerataan pembangunan di pekon Lintik?
- Muzanni :Pemekaran Desa bukan hanya berdampak kepada perkembangan masyarakat tetapi juga berdampak terhadap percepatan dan pemerataan pembangunan. Iya jadi diketahui bersama bahwa pembangunan di pekon Lintik itu sempat terhenti beberapa dekade karena alasan ekonomi dll. Tapi dengan adanya pemekaran Desa alhamdulillah percepatan dan pemerataan pembangunan mulai terlihat dan pembangunan yang sempat berhenti mulai dilanjutkan kembali “.iya jadi gitu.
- Penulis :Apa faktor penghambat dan pendukung percepatan dan pemerataan pasca pemekaran Desa di Pekon Lintik ?
- Muzanni :Faktor pendukung nya sudah pasti pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan harus memantau jalannya pembangunan. Masyarakat juga mendukung program pemerintah yang semata-mata adalah untuk percepatan dan pemerataan pembangunan. Sedangkan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat percepatan dan pemerataan pembangunan di pekon Lintik yang pertama, Terbatasnya anggaran belanja daerah untuk bidang pembangunan infrastruktur, yang kedua terbatasnya SDM, Rendahnya akses transportasi ke lokasi yang akan dibangun, Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur yang disediakan pemerintah, sehingga kondisinya cepat rusak dan yang terakhir Faktor pendanaan yang sering terlambat. Ya kurang lebih seperti itu saya sebagai sekretaris dan juga masyarakat yang mengetahui banyak tentang perkembangan semua pembangunan yang ada di pekon Lintik saya merasakan sulitnya proses pencapaian pembangunan yang tepat waktu itu.

Alhamdulillah semua hambatan-hambatan itu dapat di lewati dengan baik. dan hasilnya pun kini telah dirasakan oleh masyarakat dan saya sendiri.

Penulis :Cukup sekian terimakasih bapak untuk waktu nya wassalamualaikum,  
Wr.Wb.

Muzanni :Wa'alaikum salam warah matullahi wabarakatuh





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

*Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. (0721) 703260*

---

**RESUMEN TRANSKIP HASIL WAWANCARA (SABTU , 15 JULI 2017  
PADA PUKUL 13. 50 WIB DIKEDIAMAN TOKOH AGAM DAN TOKOH  
ADAT PEKON LINTIK YAITU BAPAK THOIBI)**

**VII. Identitas Informan I**

19. Nama : THOIBI  
20. Umur : 55 Tahun  
21. Pekerjaan : PETANI  
22. Jabatan : Tokoh Agama dan Adat Pekon Lintik, Kecamatan  
Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat  
23. Jenis Kelamin : Laki-laki  
24. Alamat : Jl. Jendral Supratman No.05 Pekon Lintik,  
Kecamatan Krui  
Selatan, Kabupaten Pesisir Barat.

**VIII. Hasil Wawancara**

- Penulis : Apa yang bapak ketahui tentang gambaran pembangunan pekon sebelum pemekaran Desa di pekon Lintik Kabupaten Pesisir Barat?  
Thoibi : Dari awal adanya pekon Lintik itu terkenal pekon yang sepi, mayoritas suku Lampung Sai batin masyarakat pendatang masih sedikit, potensi pariwisata belum tergali dan masih sangat alami, pembangunan-pembangunan mengalami pemberhentian dan tidak merata. Ya bisa dikatakan pekon yang jauh dari kemajuan seperti saat ini.
- Penulis : Tahun berapakah bapak pemekaran Desa di Pekon Lintik Kabupaten Pesisir Barat?  
Thoibi : 2010
- Penulis : Apa saja bapak manfaat dari pemekaran Desa yang terjadi di Pekon Lintik Kabupaten Pesisir Barat?  
Thoibi : iya banyak manfaat nya, jalannya bagus sekarang, jembatannya bagus, pantainya sudah rame, ada pasar gak jauh dari rumah, pembangunan pun lebih cepat dan merata, kemajuannya terlihat sekali sekarang ini. Wisatawan juga banyak yang datang karena pantai nya

yang bagus. Selain itu ada yang lebih penting yaitu untuk acara sosial, agama, bahkan acara adat pun masih di dukung oleh pemerintah termasuk peratin pekon ikut serta dan mendukung penuh dalam kegiatan.

Penulis :Bagaimana bapak kondisi sosial budaya saat ini pasca pemekaran Desa di pekon Lintik?

Thoibi :Iya, adat budaya yang ada di pekon Lintik ini sangat kental sejak zaman nenek moyang bapak dulu. Di pekon ini mayoritas adalah Lampung asli Sai Batin. Ada beberapa suku pendatang pun di pekon ini dan walaupun mereka pendatang tetapi mereka bisa menyesuaikan dengan adat disini. Alhamdulillah untuk pekon lintik semua kegiatan sudah berjalan dengan baik seperti gotong royong, pengajian, acara lampung orkes lampung dan bedikegh. Kegiatan gotong royong pada umumnya dilakukan dengan dikepalai oleh bapak peratin pekon atau sekretaris pekon Lintik dan bekerjasama dengan lembaga adat karena kegiatan gotong royong akan lebih terarah dan mudah terlaksana. Untuk kegiatan lain seperti pengajian itu dilaksanakan pada malam jum'at untuk bapak-bapak dan malam selasa untuk ibi-ibu. Sedangkan untuk acara adat sendiri acara orkes lampung dan bedikegh dilakukannya latihan setiap malam minggu yang diikutsertakan adalah bujang dan gadis atau di pekon Lintik sendiri disebut muli meghanai . Acara orkes lampung dan bedikegh itu dipakai pada saat ada acara nikahan, sunatan atau acara yang memang menggunakan arak-arakan dan di iringi oleh bedikegh.

Penulis :Bagaimana bapak kondisi Keagamaan yang ada di pekon ini?

Thoibi :agama yang masyarakat anut di pekon Lintik itu mayoritas beragama islam dan mayoritas juga bersuku lampung sai batin, yang dimana adat istiadat yang masyarakat sangat junjung tinggi. Bukan hanya ajaran agama islam saja yang mengharuskan untuk menutup aurat bagi perempuan tapi memang dari nenek moyang kami dulu juga mengajarkan itu, selain itu juga agama mengajarkan untuk berbicara sopan kepada yang lebih tua.

Penulis :Bagaimana bapak kondisi sosial politik nya di pekon Lintik?

Thoibi :siapa saja bisa menjadi pemimpin di pekon ini tidak menutup kemungkinan orang biasa pun bisa asalkan memenuhi syarat yang memang di tentukan. Tidak masalah ia lahir dari kalangan yang seperti apa karena yang kita butuhkan kedepan adalah pemimpin yang baik, jujur, dan bertanggung jawab.

Penulis :Bagaimana bapak kondisi ekonomi di pekon Lintik saat ini apakah pasca pemekaran mengalami penurunan atau sebaliknya?

Thoibi :Jauh lebih meningkat dari sebelumnya

Penulis :Bagaimana bapak menyikapi pemekaran Desa yang terjadi di i pekon lintik ini?

Thoibi :Senang, itu artinya aktivitas masyarakat maupun pemerintah bisa berjalan lebih baik kedepannya setelah pemekaran.

Penulis :Apa yang bapak/ibu rasakan sebelum dan sesudah pemekaran?

Thoibi :Ya kalau sebelumnya itu jalan masih jelek, jembatan penghubung gak ada, ada juga nyebrang sungai ada juga jalan tapi muter-muter jadi lebih jauh. Ya masih banyak lagi lah keluhan nya. Tapi alhamdulillah setelah pemekaran Desa semua lebih enak, jalan sudah bagus jelek dikit langsung di benerin, jembatan penghubung udah bagus sekarang, pasar udah dekat. Pokoknya alhamdulillah gak nyangka bakal semaju ini pekon lintik.

Penulis :Apa saja harapan bapak setelah pemekaran Desa ini?

Thoibi :Harapan saya semoga pekon Lintik kedepannya lebih maju lagi dan tetap jaya. Amin.

Penulis :Bagaimana bapak dampak pemekaran Desa terhadap percepatan dan pemerataan pembangunan?

Thoibi :-

Penulis :Cukup sekian terimakasih bapak untuk waktu nya wassalamualaikum, Wr.Wb.

Thoibi :Wa'alaikum salam warah matullahi wabarakatuh



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS USHULUDDIN**

Alamat Jl. Letkol H. EndroSuratmin, Sukarame Bandar Lampung 35131

**KARTU KONSULTASI**

Nama : Lestiawati  
NPM : 1331040089  
Pembimbing I : Drs. Effendi, M. Hum  
Pembimbing II : Drs. Agustamsyah, M. IP  
Judul Skripsi : Pengaruh Pemekaran Desa Di Kabupaten Pesisir Barat Terhadap Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan (Studi Kasus Pekon Lintik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat)

Pembimbing I

Pembimbing II

NO	Tanggal Knsultasi	Hal Konsultasi	Paraf	NO	Tanggal Konsultasi	Hal Konsultasi	Paraf
1	18/04/2017	ACC Bab I		1	01/03/2017	Perbaikan Bab I	
2	25/09/2017	Ganti Judul		2	18/04/2017	ACC Bab I	
3	29/09/2017	ACC Bab II-V		3	14/05/2017	Perbaikan Daftar Isi	
4				4	23/08/2017	Perbaikan Bab IV	
5				5	28/08/2017	Perbaikan hasil wawancara	
6				6	04/09/2017	Perbaikan kesimpulan	
7				7	08/09/2017	Perbaikan Bab IV	
				8	19/09/2017	ACC Bab II-V	

Bandar Lampung , 29 September 2017

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. Effendi. M. Hum**  
**NIP.195808211986031004**

**Drs. Agustamsyah, M. IP**  
**NIP. 196801041994031003**